

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MELAKSANAKAN
PENDIDIKAN POLITIK (STUDI PADA PARTAI GOLKAR
KABUPATEN BENGKALIS)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Sarjana Strata Satu
Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



IRSYADUL IBAD
NPM : 157310073

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Irsyadul Ibad
NPM : 157310073
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Partai Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik
(studi pendidikan politik oleh partai golkar di Kabupaten
Bengkalis).

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan korektif dan memuaskan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrative dan akademis, oleh karna itu dapat disahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 10 Juni 2020

An. Tim Penguji

Sekretaris,

Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP.

Anggota

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Anggota

Syaprianto, S.Sos., M.IP.

Ketua

Dr. Zainal, S.Sos., M.Si.

Anggota

Dra. Hj. Monalisa, M.Si.

Mengetahui
Wakil Dekan I,

Indra Safri S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Irsyadul Ibad
NPM : 157310073
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Partai Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik
(studi pendidikan politik oleh partai golkar di Kabupaten
Bengkalis).

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini telah di pelajari dan di nilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karna itu di nilai layak serta dapat di setujui dalam sidang ujian Skripsi.

Pekanbaru, 10 Juni 2020

Pembimbing I,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin.,S.IP.,M.Si

Pembimbing II,

Syaprianto.,S.Sos.,M.IP

Turut Menyetujui;

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Irsyadul Ibad
NPM : 157310073
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Partai Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik
(studi pendidikan politik oleh partai golkar di Kabupaten
Bengkalis).

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan korektif dan memuaskan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrative dan akademis, oleh karna itu dapat disahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 10 Juni 2020

An. Tim Penguji

Sekretaris,

Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP.

Ketua

Dr. Zainal, S.Sos., M.Si.

Mengetahui,

Wakil Dekan 1,

Indra Safri S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

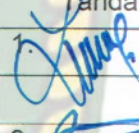
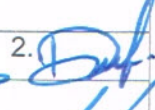
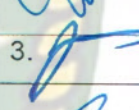
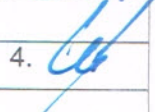
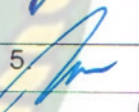
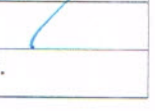
=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 110 /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 01 April 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 02 April 2020 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : **Irsyadul Ibad**
NPM : **167310403**
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Peran Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik (Studi pada Partai Golkar Kabupaten Bengkalis).**

Nilai Ujian : Angka : " **78** " ; Huruf : " **B+** "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Zainal, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP.	Sekretaris	2. 
3.	Dra. Hj. Monalisa, M.Si.	Anggota	3. 
4.	Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.	Anggota	4. 
5.	Syaprianto, S.Sos., M.IP.	Anggota	5. 
6.	Septa Juliana, S.Sos., M.Si.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 02 April 2020
An. Dekan,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 118/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Irsyadul Ibad
N P M	: 167310403
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Peran Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik (Studi Pada Partai Golkar Kabupaten Bengkalis).

1. Dr. Zainal.,S.Sos.,M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Dita Fisdian.,S.IP.,M.IP	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dra. Hj. Monalisa.,M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Dr. H. Panca Setyo Prihatin,S.IP,M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
5. Syaprianto.,S.Sos.,M.IP	Sebagai Anggota merangkap Penguji
6. Septa Juliana.,S.Sos.,M.Si	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 01 April 2020
An. Dekan

Dr. H. Panca Setyo Prihatin.,S.IP.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi IP.....
4. Arsip...SK Penguji ...

**sPERANAN PARTAI POLITIK DALAM MELAKSANAKAN
PENDIDIKAN POLITIK (STUDI PADA PARTAI GOLKAR
KABUPATEN BENGKALIS)**

ABSTRAK

IRSYADUL IBAD

Kata kunci : Fungsi. Partai Golkar, Pendidikan Politik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi partai golkar dalam melakukan pendidikan politik kepada pemilih pemula di Kabupaten Bengkalis sekaligus untuk mengetahui apa saja hambatan partai golkar dalam melaksanakan pendidikan politik kepada pemilih pemula di Kabupaten Bengkalis ini. Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian kualitatif, yaitu menjadikan manusia sebagai instrument dan di sesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitan nya dengan pengumpulan data yang pada umum nya bersifat kualitatif serta merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang merupakan data tertulis dari orang orang berperilaku yang dapat di amati. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yakni pengambilan sampel dari sumber yang paling tahu tentang apa yang di harapkan, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang sedang di teliti. Adapun teknik pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan langsung di lapangan yang di sertai dengan dokumentasi dan wawancara, data yang terkumpul kemudian di oleh dan di jadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari objektifitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang di teliti. Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa partai golkar Kabupaten Bengkalis berperan dengan baik dalam menjalankan fungsi pendidikan politik terhadap pemilih pemula di Kabupaten Bengkalis, partai golkar berhasil melakukan pendekatan dengan baik lewat media sosial dan pembinaan karakter kader partai kearah yang tepat sebelum terjun langsung memberikan pendidikan politik, dengan pemanfaatan media sosial yang baik dan maksimal beberapa hambatan yang menghalangi partai golkar melakukan pendidikan politik dapat teratasi, meski tetap ada beberapa hambatan seperti tinggi nya sentimen masyarakat terhadap partai jika melakukan pendekatan atau memberikan pendidikan politik di institusi tertentu.

FUNCTION OF PARTY IN IMPLEMENTING POLITICAL EDUCATION (STUDY GOLKAR PARTY IN BENGKALIS)

ABSTRACT

IRSYADUL IBAD

Keywords : Function. Golkar Party, Political Education

This study aims to find out how the Golkar party functions in conducting political education to novice voters in Bengkalis Regency as well as to find out what are the obstacles Golkar parties in carrying out political education to novice voters in Bengkalis Regency. In this study used a qualitative research type, which is to make humans as an instrument and adapted to a reasonable situation in relation to the collection of data that are generally qualitative in nature and is a research procedure that produces descriptive data which is written data from people behaving who can observed. Determination of informants in this study using purposive sampling techniques, namely sampling from sources who know best about what to expect, making it easier for researchers to explore objects or social situations that are being studied. The data collection technique used in this study is direct observation in the field accompanied by documentation and interviews, the data collected is then used and made as the main raw material for analyzing the empirical conditions of the objectivity of the existence of research objectives at the location being examined. Thus the authors can conclude that the Bengkalis regency Golkar party plays a good role in carrying out the function of political education for novice voters in Bengkalis regency, the Golkar party successfully approached well through social media and fostering the character of party cadres in the right direction before plunging directly into political education, With good use of social media and a maximum of several obstacles that prevent the Golkar Party from conducting political education, it can be overcome, although there are still some obstacles such as the high level of public sentiment towards the party if they approach or provide political education in certain institutions

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim...

Puji syukur penulis ucap kan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-nya kepada penulis, sehingga melalui proses yang panjang akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“Peranan Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik (studi Pada partai golkar Kabupaten Bengkalis)”** yang di susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana ilmu pemerintahan.

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besar nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung. maka dari itu menulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau ini.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di tempat yang beliau pimpin.

3. Bapak Budi Mulianto, S.IP., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Dosen Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi serta mengajarkan ilmu pengetahuan sehingga memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan serta sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Panca Setyo Prihatin.,S.IP.,M.Si selaku pembimbing 1 yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis baik di dalam proses belajar maupun dalam penulisan Skripsi ini
5. Bapak Syaprianto.,S.Sos.,M.IP sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan nasehat serta ilmu di dalam masa studi.
6. Ibu Annisa Mardatillah, S.Sos.,M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan nasehat dan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh staf, Karyawan/I Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik serta Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak H. Mustapa Alwi selaku Wakil Ketua Partai Golkar Bengkalis yang telah banyak membantu penulis dalam mendapatkan Informasi untuk skripsi ini.

Penulis menyadari sesungguhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak terdapat beberapa kekurangan, kelemahan serta kesalahan, kelemahan serta kesalahan, karna penulis menyadari keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Namun demikian berkat bimbingan dan petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan

Skripsi ini tepat pada waktunya. Untuk itu sebelum dan sesudah nya penulis ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 24 february 2020

Penulis

Irsyadul Ibad



Dokumen ini adalah Arsip Mlik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.	i
KATAPENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACK	xi
BAB I :PENDAHULUAN.	1
A. Latar Belakang.	1
B. Rumusan Masalah.	10
C. Tujuan Penelitian.	11
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II :STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN.	12
A. Studi Kepustakaan.	12
B. Penelitian Terdahulu.	33
C. Kerangka Pikiran.	34
D. Konsep Operasional.	34
E. Operasional Variabel.	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Tipe Penelitian.	37
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Informant Dan Keyforment.....	38
D. Jenis Dan Sumber Data.	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Tehnik Analisis Data.....	41
G. Jadwal Dan Waktu Kegiatan.....	43
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	44
A. Gambaran Kabupaten Bengkalis.....	44
B. Gambaran Umum Partai Golkar Bengkalis	46

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Identitas Responden	54
B. Peranan Partai Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik (Studi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Oleh Partai golkar Di Kabupaten Bengkalis)...	57
C. Analisis Hasil	73
D. Hambatan-hambatan yang di hadapi oleh Partai Golkar dalam melakukan Pendidikan Politik terhadap Pemilih Pemula di Kabupaten Bengkalis.....	76
BAB VI PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel	Hlm
I.I Perolehan Kursi Partai Keadilan Golongan Karya pada pemilu DPRD..... Kabupaten Bengkalis Tahun 2009, 2014 dan 2019.....	9
II.I Penelitian Terdahulu yang mengkaji Tentang Penyakit Masyarakat.....	33
II.II Operasional Variabel.....	36
II.III Jadwal Waktu Penelitian Fungsi Partai Politik Dalam Melakukan Pendidikan Politik Bagi Partai Pemula Di Kabupaten Bengkalis.....	41
V.1 Jumlah populasi responden berdasarkan tingkat pendidikan.....	52
V.II Jumlah populasi responden berdasarkan Jenis kelamin.....	53
V.II Jumlah populasi responden berdasarkan umur.....	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hlm
I.I	Perbandingan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis 2019-2024.....	9
II.I	Kerangka Pemikiran Tentang Partai Politik Dalam Melakukan Pendidikan Politik Terhadap Pemilih Pemula Di Kabupaten Bengkalis.....	33



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang terbentuk berdasarkan semangat kebangsaan yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan Negara Indonesia Berdasarkan atas Hukum (*Rechtsstaat*). Jelaslah bahwa Indonesia adalah suatu Negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Negara hukum dan Negara kesejahteraan) (Kansil, 2008:14).

Dalam rangka mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan amanat Konstitusi Pancasila, Negara Republik Indonesia mewujudkannya dengan menggunakan sistem Demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Demokrasi telah menjadi suatu arus kemajuan zaman bagi Negara-negara Modern. Demokrasi berdiri berdasarkan prinsip kebersamaan yaitu bahwa setiap Warga Negara memiliki kesamaan Hak dan kedudukan di dalam pemerintahan. Pemerintahan yang demikian merupakan kekuasaan rakyat yang menjadi sumber Legitimasi kekuatan Negara (dalam *Demokrasi dan pemilu di Indonesia : 2012*).

Partai politik banyak bermunculan saat diselenggarakan nya Pemilu 7 juni 1999 dimana merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan setelah reformasi. Peserta pemilu pada tahun 1999 jauh berbeda dengan pemilu pada masa orde baru, dimana pada masa orde baru hanya diikuti oleh dua partai politik (PDI dan PPP) serta termasuk satu golongan karya (Golkar) dan pada pelaksanaan pemilu 1999 diikuti oleh 26 partai politik, baik partai politik lama maupun baru.

Partai politik adalah organisasi yang bersifat Nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota , masyarakat, Bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik memiliki beberapa fungsi yang di jelaskan dalam Undang undang Nomor 2 tahun 2008 yaitu,

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan

- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Kemudian partai politik juga di jelaskan secara umum memiliki empat fungsi yaitu

- a. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik
- b. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik
- c. Partai politik sebagai sarana recruitment
- d. Dan partai politik sebagai sarana pengatur konflik

Jika di simak dari perspektif aturan, maka peranan parpol selain wadah recruitment politik dalam arti menyiapkan calon-calon legislatif, juga adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan menciptakan iklim yang kondusif dalam proses pemilu demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam hubungan nya dengan KPU, maka peran parpol yang di harapkan adalah:

1. Bersinergi secara positif dengan KPU, dengan cara turut berpartisipasi aktif dalam setiap pelaksanaan tahapan pemilu
2. Membantu melakukan sosialisasi terhadap berbagai aturan tentang pemilu di internal parpol, khusus nya calon legislatif nya masing-masing.
3. Melakukan rekrutment politik dan mampu memahami aspirasi masyarakat terhadap calon legislative.

4. Melakukan pendidikan politik secara aktif kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih.
5. Membantu KPU, dalam rangka pencermatan data pemilihdata pemilih, agar data pemilih benar-benar akurat, valid dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
6. Meningkatkan pemahaman tentang etika dan budaya politik bagi caleg-calegnya, khususnya didalam pelaksanaan tahapan Pemilu seperti kampanye dan lain-lain.
7. Bersama-sama KPU dan pemangku kepentingan Pemilu lainnya, untuk menjaga kondisi masyarakat yang tetap kondusif, aman dan damai.(Muh Iqbal latief : 2016)

Partai politik di tuntut untuk memberikan pendidikan politik kepada anggota partai dan masyarakat seperti yang tercantum di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 di pasal 1 Nomor 4 di jelaskan bahwa Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kemudian di lanjutkan di pasal 34 poin 3a bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.

Pada umumnya pendidikan politik yang dilaksanakan Negara bertujuan untuk mempersiapkan generasi penerus sebagai penerima dan pelanjut sistem nilai (sistem politik, pola keyakinan dan sistem budaya), menyamakan sistem

berfikir tentang nilai-nilai yang dapat mempedomani aktivitas kehidupan bernegara, memantapkan sikap jiwa di dalam melaksanakan sistem nilai-nilai religius, sekaligus membangun hasrat melestarikan sistem nilai (Soemarno, AP. 2002). Pendidikan politik ialah suatu proses mengajarkan kepada masyarakat mengenai nilai-nilai, norma-norma, serta simbol-simbol politik melalui media berupa sekolah, pemerintah, dan juga partai politik. Proses pendidikan politik dapat dilakukan melalui kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi dan seminar serta keikutsertaan dalam forum pertemuan. Selain itu, pendidikan politik juga diperlukan untuk menunjukkan bagaimana cara berpolitik yang sehat, bersaing yang sehat, dan mendidik masyarakat untuk mematuhi aturan(Labolo, 2015:20).

Menurut Kartini Kartono (1989: 14) pendidikan politik adalah upaya sistematis yang sengaja di bentuk untuk membentuk individu agar menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara moral atau etis dalam mencapai tujuan politik.

Selain itu, pendidikan politik oleh partai politik juga bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik serta kesadaran politik, sebagaimana juga bertujuan untuk membentuk kemampuan dalam berpartisipasi pada individu agar menjadi partisipan politik yang aktif dan positif(Priatmoko, 2003:180). Partai politik memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan politik kepada pengurus, kader partai serta masyarakat luas. Pendidikan politik tersebut dapat disampaikan melalui metode dan materi penyampaian sebagai berikut (Labolo, 2015:21) :

1.Materi pendidikan

Materi yang disampaikan dalam proses pendidikan politik kepada kader dan pengurus partai lebih berorientasi kepada pemantapan dan pengembangan program partai, peningkatan loyalitas dan dedikasi kader, peningkatan kualitas kemampuan kader untuk dapat berfikir futuristik. Sedangkan materi yang disampaikan dalam proses pendidikan politik kepada masyarakat meliputi posisi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan konstitusi negara.

2.Metode pendidikan

Berdasarkan penjabaran materi pendidikan diatas, diketahui bahwa materi pendidikan politik yang disampaikan kepada kader dan pengurus partai maupun masyarakat berbeda. Hal ini juga disebabkan metode yang digunakan untuk menyampaikan materi tersebut juga berbeda. Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada kader dan pengurus partai adalah penyampaian yang intensif secara langsung untuk membentuk mindset mereka agar memiliki loyalitas dan integritas kepada partainya. Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada masyarakat dapat berupa penyampaian secara langsung maupun tidak langsung. Namun pada praktiknya, penyampaian materi lebih sering dilakukan secara tidak langsung, misalnya dengan menggunakan media massa sebagai perantara. Adapun tujuan dari pendidikan politik yakni dapat membentuk, sebagai berikut :

a. Kepribadian politik

Kepribadian politik adalah sejumlah orientasi yang terbentuk pada individu untuk menghadapi dunia politik. Kepribadian politik merupakan tujuan pokok dari proses pendidikan politik. Oleh karena itu, tidak ada kesadaran politik tanpa kandungan kepribadian politik di. Dan juga tingkat partisipasi politik juga dipengaruhi oleh jenis kultur yang membentuk kandungan kepribadian politik.

b. Kesadaran politik

Kesadaran politik adalah berbagai bentuk pengetahuan, orientasi, dan nilai-nilai yang membentuk wawasan politik individu, yang ditinjau dari keterkaitan dengan kekuasaan politik. Lebih tepatnya, merupakan sebuah pengetahuan yang kritis serta pandangan yang benar terhadap suatu realitas.

c. Partisipasi politik

Partisipasi politik merupakan kegiatan sukarela atau sebuah hasrat individu untuk berperan aktif dalam kehidupan politik melalui pengelolaan hak suara, atau pencalonan untuk lembaga

- lembaga yang dipilih, serta mendiskusikan persoalan
- persoalan politik dengan orang lain atau bergabung dengan organisasi
- organisasi mediator Pendidikan politik yang diberikan secara maksimal dan berkelanjutan akan berkorelasi dengan tingkat partisipasi politik dari masyarakat.

Edgar Foredkk (1978) dalam (Prihatmoko, 2003: 74) mendefinisikan pendidikan politik sebagai penyiapan generasi untuk berfikir merdeka seputar esensi kekuasaan dan pilar-pilarnya, dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran politik dan mendidik karakter manusia nonformal oleh partai politik, media massa, lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Penulis memilih partai golkar sebagai obyek penelitian dikarenakan beberapa hal yang menurut penulis menarik, yang utama adalah bagaimana partai golkar sukses di hati masyarakat maupun target target politik nya di Kabupaten Bengkalis, bahkan mampu menempatkan orang-orang perwakilan dari partai nya untuk duduk di posisi-posisi penting pemerintahan yang ada di Kabupaten Bengkalis. di pemilihan legislatif 2014 partai Golkar memperoleh delapan kursi untuk Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bengkalis, manakala di Pemilu 2019 ini Target Partai golkar untuk menempatkan para kader nya di kursi DPRD Kabupaten terus meningkat menjadi 20% atau 9 kursi.

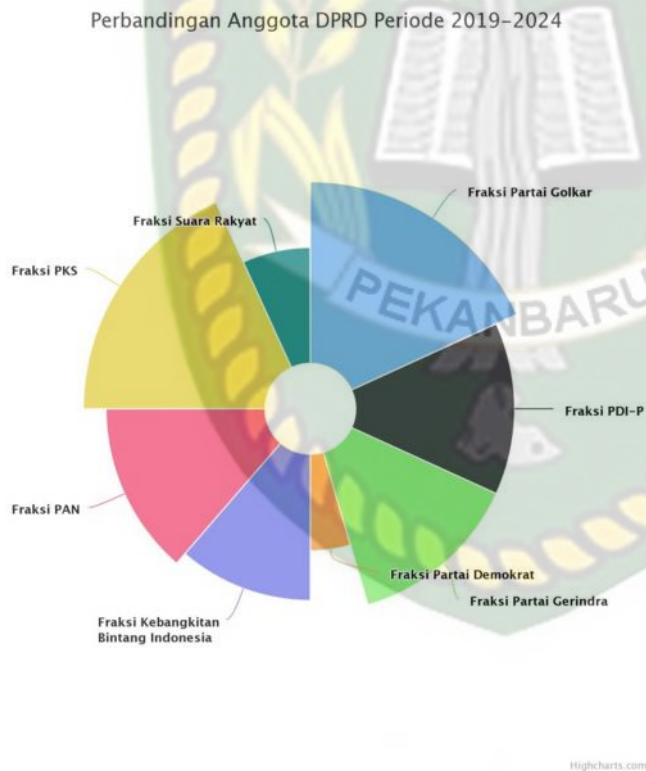
Penulis menemukan terjadinya peningkatan perolehan suara dan target politik partai golkar dari tahun ketahun, baik itu perolehan suara maupun target politik partai golkar di Kabupaten Bengkalis terus mengalami peningkatan, peningkatan tersebut dapat dilihat dari tabel dan gambar dibawah ini;

Tabel I.I Perolehan Kursi Partai Keadilan Golongan Karya pada pemilu DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2009, 2014 dan 2019

Periode pemilu	Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6	jumlah	Jumlah kursi di DPRD
Tahun 2009								5
Tahun 2014	2474	1150	4027	3987 1407	3375	1220	17640	8
Tahun 2019	6.829	4.740	8.944 2.981	10.342 3.447	7417	4318	49,068	8

Sumber Media Massa Go Riau 20 mei 2019

Gambar I.I Perbandingan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis 2019-2024



Sumber KPU Bengkalis 2019

Dari Kondisi yang penulis temukan di lapangan penulis tertarik untuk mengamati Peranan partai Golkar dalam memberikan pendidikan politik di Kabupaten Bengkalis, yang dapat penulis rangkum sebagai berikut:

1. Penulis mendapat informasi Belum ada dilakukan pendidikan politik dari partai golkar yang khusus di tujukan untuk pemilih pemula di Kabupaten Bengkalis.
2. Walaupun Partai Golkar Kabupaten Bengkalis memperoleh suara rakyat yang banyak dalam setiap pemilihan umum, namun di lapangan penulis menemukan kurang nya peran kader partai golkar dalam melakukan pendidikan politik terhadap pemilih pemula.

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji pendidikan politik oleh partai golkar di Kabupaten Bengkalis, maka penulis merumuskan judul penelitian “Peranan Partai Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik (Studi Pendidikan Politik Oleh Partai Golkar di Kabupaten Bengkalis)”.

B. Rumusan Masalah

Antusiasme politik rakyat menuntut Partai Politik di Kabupaten Bengkalis harus berlomba meningkatkan kualitas nya masing masing. Partai politik di harapkan mampu memberikan perubahan ke arah yang lebih baik untuk daerah maupun Nasional lewat pendidikan politik. Adapun rumusan masalah penulis adalah **Bagaimanakah Peranan Partai Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik (Studi Pendidikan Politik Oleh Partai Golkar di Kabupaten Bengkalis)”.**?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Peranan partai Golkar Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan pendidikan politik di Kabupaten Bengkalis.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat partai politik dalam melakukan pendidikan politik di Kabupaten Bengkalis.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian berguna untuk menjelaskan manfaat penelitian , yang terbagi dua sebagai Penelitian teoritis dan praktis (Riduwan 2009 : 11), yang di dalam penelitian ini adalah:

a. Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu karya ilmiah yang turutmendukung bagi pengembangan ilmu pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau sebagai sumber referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan menambah sumber pustaka yang telah ada.

b. Praktis

- 1) Bagi Partai Politik dapat di jadikan referensi penting nya melibatkan pihak kampus dalam mempertimbangkan memberikan pendidikan politik.
- 2) Bagi para akademisi penelitian ini sebagai pengetahuan dan informasi guna menciptakan kemampuan pemahaman mengenai pendidikan politik.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Dari definisi Awang (2012;6) pemerintah adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik, dan gerakan kekuatan eksekutif, politik, dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi, dan hukum dalam sebuah Negara.

Sedangkan definisi pemerintah menurut syafiie (2003;20) mengemukakan bahwa pemerintah berasal dari kata “perintah” yang memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang di perintah memiliki ketaatan.

Pemerintah dalam bahasa inggris di sebut government yang berasal dari bahasa latingobernate, *geek gibernen* yang berarti mengemudikan, atau mengendalikan.

Menurut Musanef (dalam syafiie. 2007; 32) ilmu pemerintahan dapat di derfenisikan sebagai berikut :

- a. Suatu ilmu dapat menguasai memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara

dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu

- b. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis, problema-problema sentralisasi, desentralisasi organisasi pengawasan ke dalam ke luar
- c. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana baik nya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, dan dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak satu dengan yang lain, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan.
- d. Ilmu yang diterapkan mengadakan penyelidikan umum dalam arti yang seluas-luasnya baik sebagai susunan maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

Selanjutnya pemerintah harus sesuai dengan karakteristik struktural sebagai pemegang otoritas formal harus mampu bertindak netral, dalam kompleksitas kepentingan. Fungsi yang dijalankan pemerintah sebagai pemberdaya masyarakat harus benar-benar berada di atas komunitas civil society yang sedang membangun diri (moeljarto. 2001;77).

Sedangkan menurut Ndraha (2005;36), pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakat,

sedangkan pemerintah ialah proses pemenuhan perlindungan kebutuhan kepentingan masyarakat. Memahami pemerintahan dengan konteks awal kejadian nya, menunjukkan bahwa hubungan yang ada antara struktur pemerintah dengan rakyat adalah hubungan yang saling menguat, yaitu pemerintah di suatu sisi berkewajiban mengikuti dan mentaati masyarakat berdasarkan kewenangan yang di miliki nya.

Untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagai tujuan Negara, maka pemerintah perlu melakukan upaya-upaya, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan untuk mengatur aspek kehidupan bernegara sehingga dengan itu tujuan Negara dapat terwujud.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di katakan pemerintah merupakan organisasi yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan masyarakat secara merata sehingga kesejahteraan umum dapat tercapai dengan baik.

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan di sebut pemerintah, secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut rasyid (1997 : 13) antara lain :

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan di dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.

- b. Menjaga ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan di antara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung dengan damai.
- c. Peraturan yang adil kepada semua warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka
- d. Memberikan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin di kerjakan oleh lembaga non pemerintah
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas
- g. Menerapkan kebijakan yang memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2. Teori Peranan

Menurut Soerjono Soekanto (2002; 243) Pengertian Peranan adalah sebagai berikut: Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Konsep tentang Peran (role) menurut Komarudin (1994; 768) dalam buku “ensiklopedia manajemen “ mengungkap sebagai berikut :

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen;
- b. Pola prilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status;

- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata;
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Peranan adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang merupakan hubungan sebab akibat. 9 Menurut Soerjono Soekanto (2002: 243), peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;

c. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa setiap individu atau kelompok yang dalam hal ini adalah dinas perhubungan, menjalankan peranan sesuai dengan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi dinas perhubungan dalam masyarakat, yang artinya menjalankan peranan berdasarkan peraturan-peraturan yang membimbing dinas perhubungan dalam proses pembangunan masyarakatnya, dalam hal ini penulis merujuk norma hukum berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah, dan norma sosial yang apabila peranan ini dijalankan oleh dinas perhubungan maka akan tercipta suatu hubungan yang memunculkan nilai pelayanan antara dinas perhubungan dengan masyarakatnya yang disebut dengan lingkaran sosial (social circle), yang diikuti dengan apa yang dapat dilakukan dinas perhubungan dalam masyarakat, dan juga perilaku dinas perhubungan yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Selain itu, menurut Soekanto (2002: 243), pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat, penting bagi hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya;

b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya;

c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak;

d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut. Begitu pentingnya peranan sehingga dapat menentukan status kedudukan seseorang dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Hal inilah yang hendaknya kita pikirkan kembali, karena kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan daripada peranan. Hal ini juga yang menunjukkan gejala yang lebih mementingkan nilai materialisme daripada spiritualisme. Nilai materialisme dalam kebanyakan hal diukur dengan adanya atribut-atribut atau ciri-ciri tertentu yang bersifat lahiriah dan di dalam kebanyakan hal bersifat konsumtif. Tinggi rendahnya prestise seseorang diukur dari atribut-atribut lahiriah tersebut.

3. Teori Demokrasi

Secara etimologi “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan *crates* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan, jadi kata demokrasi memiliki arti suatu system pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Demokrasi adalah prinsip dasar tata kehidupan masyarakat, baik dalam interaksi sesama komponen masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintahan atau Negara. Dalam rangka mewujudkan masyarakat sipil atau masyarakat madani, demokrasi adalah prasyarat mutlak. Sejak lengser nya pemerintahan orde baru di tahun 1998, demokrasi menjadi kosakata umum bagi siapa saja yang menyatakan pendapat. Dari kalangan cendekiawan sampai ke kalangan awam.

Joseph A. Schumeter mengatakan bahwa, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusi untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Sedangkan Hendri B. Mayo juga mengatakan demokrasi sebagai system politik merupakan suatu menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar kebijakan rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang berdasarkan atas prinsip kesamaan politik (Mahfud, 2003:19).

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa demokrasi hakikat nya adalah rakyat sebagai peran utamanya dalam proses sosial dan politik, dengan kata lain pemerintahan berada di tangan rakyat yang mengandung pengertian tiga hal : pemerintah dari rakyat (government of the people); dan pemerintahan dari rakyat (government by the people); dan pemerintahan untuk rakyat (government for the people). (Ubaidillah, 2000:40).

Jadi suatu sistem menganut paham Demokrasi apabila pemimpin atau wakil rakyat di pilih langsung oleh rakyat dewasa melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, berdasarkan nilai-nilai

keadilan dan kejujuran. Yang mana dalam pelaksanaannya para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan semua penduduk yang telah memiliki hak pilih berhak memberikan suaranya dan dijamin oleh Negara melalui Undang-Undang yang dijalankan secara adil.

4. Teori Kepartaian Dan Pemilu

Di Negara yang menganut sistem demokrasi kekuasaan rakyat merupakan kedaulatan rakyat yang dijunjung tinggi, dengan menandakan ini sebagai suatu keniscayaan yang menganggap suara rakyat adalah kedaulatan tertinggi.

a. Masa Yunani kuno dan Romawi kuno

Istilah kedaulatan rakyat sudah dikenal sejak abad ke IV sebelum masehi. Menyebut demokrasi berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *cratin* yang berarti pemerintahan. Dengan jenis kedaulatan rakyat pada masa itu tidak dapat diterapkan pada saat ini karena Negara Yunani kuno merupakan Negara kecil yang jumlah penduduknya terbatas yang disebut dengan *polis state* atau Negara kota. Dengan perwakilan dari beberapa suku bangsa pada kerajaan yang pemerintahannya terdiri dari kaum *patrecia* (ningrat). Hal demikian merupakan kemunculan awal demokrasi dengan ditandai adanya pelepasan jabatan raja akibat adanya pertentangan dari kaum *patricia* dengan kaum *plebian* (rakyat jelata) sehingga memunculkan sebuah sistem baru yang terdapat perwakilan antar dua golongan dalam satu pemerintahan yang mulanya hanya dikuasai oleh golongan *patricia* semata. Dengan

demikian Negara romawi mengalami pergeseran pandangan mulanya menggunakan prinsip kerajaan yang menggunakan prinsip kerajaan menjadi Negara demokrasi atau kedaulatan rakyat (*dalam Dr.J.J von schmid, ahli ahli pemikir besar tentang Negara dan hukum. Plato – kant*).

b. Abad ke V- abad ke XV (abad pertengahan)

Berjalan nya abad pertengahan memberikan kesempatan bagi agustinus melakukan perubahan dengan ajaran kedaulatan tuhan, dalam paham agustinus yang mana mengembalikan sesuatu kepada tuhan dengan segala asumsi yang terjadi merupakan kehendak tuhan, selanjutnya muncul paham marcilius (1270-1340) yang menggunakan faham menitik beratkan Negara kepada raja sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang selanjutnya menimbulkan kekuasaan yang absolute yang di perkuat pula dengan ajaran Nicole Machiavelli (1469 M-1527 M) dengan bukunya yang terkenal yaitu *II principle* dengan ajaran *staat – raisonnya* yang mengibaratkan seorang raja adalah kancil dan singa yang tak menepati janji janjinya.

c. Abad ke XVII dan XVIII

Pada masa ini muncul mengenai teori hak hak alamiah manusia. Dalam masa ini bagi masyarakat yang memilih raja maka di asumsikan sudah menggunakan perjanjian penyerahan kekuasaan terhadap raja yang di tunjuk namun raja tidak memiliki kewajiban untuk menuruti kemauan atas permintaan petunjuk nya sehingga kembali ke pada kekuasaan

yang absolute. Ajaran terakhir pada masa ini adalah Immanuel Kant, yang menyatakan Negara adalah suatu keharusan adanya karena Negara harus menjamin kepentingan umum serta memberikan keterbukaan pada setiap orang untuk melakukan hal yang dianggap baik.

d. Abad ke XIX sampai saat ini

Pada abad ini sudah mulai terbentuknya partai politik yang merupakan representatif rakyat yang memicu berkembangnya demokrasi modern. Secara harfiah demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat. Robert Dahl (dalam Prof. Abdul Bari Azed, SH, MH pemilu dan partai politik di Indonesia: 17) mengatakan demokrasi responsive hanya terjadi jika paling sedikit terdapat delapan jaminan di dalam institusi.

1. Kebebasan untuk dapat membuat dan bergabung di dalam organisasi
2. Kebebasan berekspresi
3. Hak memilih
4. Sifat untuk memenuhi syarat di dalam pemerintahan
5. Hak terdapat pemimpin politik bersaing untuk mendukung suara
6. Sumber alternatif terhadap informasi
7. Pemilihan umum yang bebas dan jujur

8. Intitusi institusi untuk perbuatan kebijakan pemerintah yang tergabung pada suara pemilih dan pernyataan pernyataan pilihan yang lain.

Pemilihan umum dan partai politik merupakan dua hal yang tidak bisa di pisahkan dari demokrasi.Keduanya merupakan perwujudan demokrasi dimana rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan jalan nya pemerintahan dengan ikut serta dalam pemilihan umum, untuk memilih wakilnya yang dapat mengakomodasi kepentingan dengan cara memilih partai politik.*(pemilu dan partai politik di Indonesia:V).*

Menurut UU RI Nomor 31 Tahun 2002, partai politik merupakan organisasi politik yang di bentuk oleh sekelompok Warga Negara RI secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita cita, untuk memperjuangkan kepentingan anggota,kepentingan masyarakat, Bangsa dan Negara melaui pemilu.

Partai politik adalah sebuah organisasi yang di buat untuk memperjuangkan nilai atau ideology tertentu melalui penguasaan ideologi kekuasaan dan kekuasaan nya itu nya itu di peroleh dari keikut sertaan nya di pemilihan umum (Sigit Pamungkas 2011:5).

Secara umum dapat di katakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota nya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh

kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka (Budiarjo, 2005: 60).

5. Pemilih Pemula

Menurut Poerwadarminta (1976:314) kata “Muda” adalah belum sampai setengah umur, atau masih muda. Pengertian generasi muda dapat dibedakan dalam beberapa kategori :

1. Biologi, generasi muda adalah mereka yang berusia 12-15 tahun (remaja) dan 15-30 tahun (pemuda).
2. Budaya, generasi muda adalah mereka yang berusia 13-14 tahun.
3. kerja, yang dibuat oleh Depnaker adalah yang berusia 18-22 tahun.
4. Kepentingan perencanaan pembangunan, yang disebut sebagai sumber daya manusia muda adalah yang berusia 0-18 tahun
5. Ideologi Politik, generasi muda yang menjadi pengganti adalah mereka yang berusia 18-40 tahun.
6. Lembaga dan lingkungan hidup sosial.

Generasi muda dibedakan menjadi 3 kategori yaitu Siswa, yakni usia 6-8 tahun, Mahasiswa, yakni usia 18-25 tahun dan Pemuda yang berada diluar sekolah / PT berusia 15-30 tahun. Menurut Kurniadi (1991:103) generasi muda secara umum dapat dipandang sebagai suatu fase dalam siklus pembentukan

kepribadian manusia, sebagaimana juga dalam fase-fase lainnya, maka fase generasi muda ini mempunyai cirinya sendiri, yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Ciri yang menonjol dari fase generasi muda ini ialah peranannya dalam masa peralihan menuju suatu kedudukan yang bertanggung jawab dalam tatanan masyarakat, antara lain:

- a. Kemurnian idealismenya.
- b. Keberanian dan keterbukaannya dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan baru.
- c. Semangat dan pengabdianya.
- d. Spontanitas dan dinamikanya.
- e. Inovasi dan kreatifitasnya.
- f. Keinginan-keinginannya untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru.
- h. Keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan kepribadian yang mandiri.
- i. Masih langkanya pengalaman-pengalaman yang dapat merelevansikan pendapat, sikap dan tindakannya dengan kenyataan-kenyataan yang ada.

Kemudian menurut Rudini dan Hidayat (1989:156) generasi muda adalah sebagai personifikasi dari satu generasi penerus didalam sistem kehidupan politik yang mengacu kepada pelaksanaan demokrasi pancasila, ia mempunyai peranan yang amat strategis.

Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali menentukan hak pilih nya, menurut Pahmi (2010:54) pemilih adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sesudah/pernah kawin. Pemilih dalam setiap pemilihan umum di daftarkan melalui pendataan yang di lakukan oleh petugas yang di tunjuk oleh penyelenggara pemilihan umum. Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih yaitu 17 hingga 21 tahun. Pengetahuan mereka terhadap pemilihan umum tidak berbeda jauh dengan kelompok lain nya, yang membedakan adalah soal antusiasme dan preferensi.

6. Teori Fungsi

Pengertian fungsi menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia adalah kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang di lakukan. Sedangkan Moekijat dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu fungsi adalah suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu. Menurut The Liang Gie fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Defenisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan defenisi fungsi menurut Sutarto dalam Zainal (2008:22), yaitu fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungan nya satu sama lain untuk di lakukan oleh pegawai tertentu yang masing masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang di miliki oleh seseorang dalam kedudukan nya di dalam organisasi sesuai dengan bidang tugas masing masing (admosudirjo, 2001:4).

Berdasarkan pengertian masing masing dari kata tugas pokok dan fungsi di atas, maka dapat di simpulkan tugas pokok dan fungsi merupakan kesatuan kegiatan atau pekerjaan yang di laksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta keterkaita satu sama lain.

7. Pendidikan politik

Pendidikan politik merupakan proses dialog antara pendidik, seperti sekolah, pemerintah, partai politik dan peserta didik dalam rangka pemahaman, penghayatan dan pengamatan nilai, norma dan simbol politik yang dianggap ideal dan baik. Melalui kegiatan kursus latihan kepemimpinan, diskusi dan keikutsertaan dalam berbagai forum pertemuan, partai politik dalam sistem politik demokrasi dapat melaksanakan fungsi pendidikan politik. Media massa yang terbuka dan kritis juga sangat penting dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Melalui kritik-kritik mereka yang tajam dan konstruktif, masyarakat dapat memahami dari sisi lain mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Menurut Rusadi Kantaprawira (2004:55) Pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. bentuk-bentuk

pendidikan politik dapat dilakukan melalui Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum, Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media), dan Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal.

Salah satu tujuan pendidikan politik adalah untuk membangun politik warga Negara. Konsep-konsep dasara politik tertentu menjadi sangat penting untuk dibangun karna tanpanya kesadaran politik yang kritis tidak mungkin di tumbuhkan padahal, kesadaran politik yang kritis merupakan syarat penting nya bagi partisipasi politik warga Negara (Nur, 1999; 51)

Menurut Surono sebagaimana dikutip Ramdlang Naning (1982:8). Pendidikan politik adalah usaha untuk masyarakat politik, dalam arti mencerdaskan kehidupan politik rakyat, meningkatkan kesadaran warga terhadap kepekaan dan kesadaran hak, kewajiban dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Menurut Pangabea, sebagaimana dikutip Ramdlang Naning (1982:9) Politik adalah cara bagaimana suatu bangsa mentransfer budaya politiknya dari genggamannya generasi yang satu ke generasi kemudian. Alfian (1990:245-246) Mengidentifikasi pendidikan politik dalam arti kata yang longgar yaitu sosialisasi politik adalah bagian langsung dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Disenangi ataukah tidak, diketahui ataukah tidak, disadari ataukah tidak, hal itu dialami oleh anggota-anggota masyarakat, baik penguasa ataupun orang awam. Jadi kalau boleh disimpulkan, pendidikan politik (dalam arti kata yang

ketat) dapat diartikan usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai politik yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil penghayatan itu akan menghasilkan/melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal itu, dan bersamaan dengan itu lahir pula kebudayaan politik baru. Surbakti (1999:117) berpendapat bahwa sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.

Partai-Partai politik Khususnya di Negara berkembang memainkan peran penting dalam menciptakan dan mengubah kultur politik, berdirinya partai-partai politik dalam suatu masyarakat merupakan media pendidikan politik yang sesungguhnya (Muis, 2000: 124). Menurut Alfian dalam (Karim, 1989: 97) mendefenisikan pendidikan politik dapat di artikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul-betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu system politik ideal yang hendak di bangun.

8. Partai Golongan Karya

Sejarah Partai Golongan Karya (GOLKAR) bermula pada tahun 1964 dengan berdirinya Sekretariat Bersama (SEKBER) Golkar di masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Sekber Golkar didirikan oleh golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat (seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta 53 Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi. Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:

1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)
2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
4. Organisasi Profesi
5. Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)
6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)

7. Gerakan Pembangunan untuk menghadapi Pemilu 1971 Ke- 7 (tujuh) KINO.

Ini merupakan kekuatan inti dari Sekber Golkar tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (GOLKAR). Logo dan nama ini, sejak Pemilu 1971, tetap dipertahankan sampai sekarang. Pada Pemilu 1971 ini, Sekber Golkar ikut serta menjadi salah satu konsestan. Pihak parpol memandang remeh keikutsertaan Golkar sebagai kontestan Pemilu. Mereka meragukan kemampuan komunikasi politik Golkar kepada grassroot level. Nahdlatul Ulama (NU), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) yang mewakili kebesaran dan kejayaan masa lampau sangat yakin keluar sebagai pemenang. Mereka tidak menyadari kalau perpecahan dan kericuhan internal mereka telah membuat tokoh-tokohnya berpindah ke Golkar. Hasilnya di luar dugaan. Golkar sukses besar dan berhasil menang dengan 34.348.673 suara atau 62,79 % dari total perolehan suara. Perolehan suaranya pun cukup merata di seluruh propinsi, berbeda dengan parpol yang berpegang kepada basis tradisional. NU hanya menang di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai Katholik di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa Tengah, Parmusi di Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan Murba tidak memperoleh suara signifikan sehingga tidak memperoleh kursi DPR..

Ketua Umum GOLKAR dari masa ke masa :

1. Djuhartono (1964-1969)

2. Suprpto Sukowati (1969–1973)
3. Amir Moertono (1973–1983)
4. Sudharmono (1983–1988)
5. Wahono (1988–1993)
6. Harmoko (1993–1998)
9. Akbar Tandjung (1998–2004)
10. Jusuf Kalla (2004–2009)
11. Aburizal Bakrie (2009–2014)
12. Setya Novanto (2016-2017)
13. Airlangga Hartanto (2017-Petahana)



B. Penelitian Terdahulu

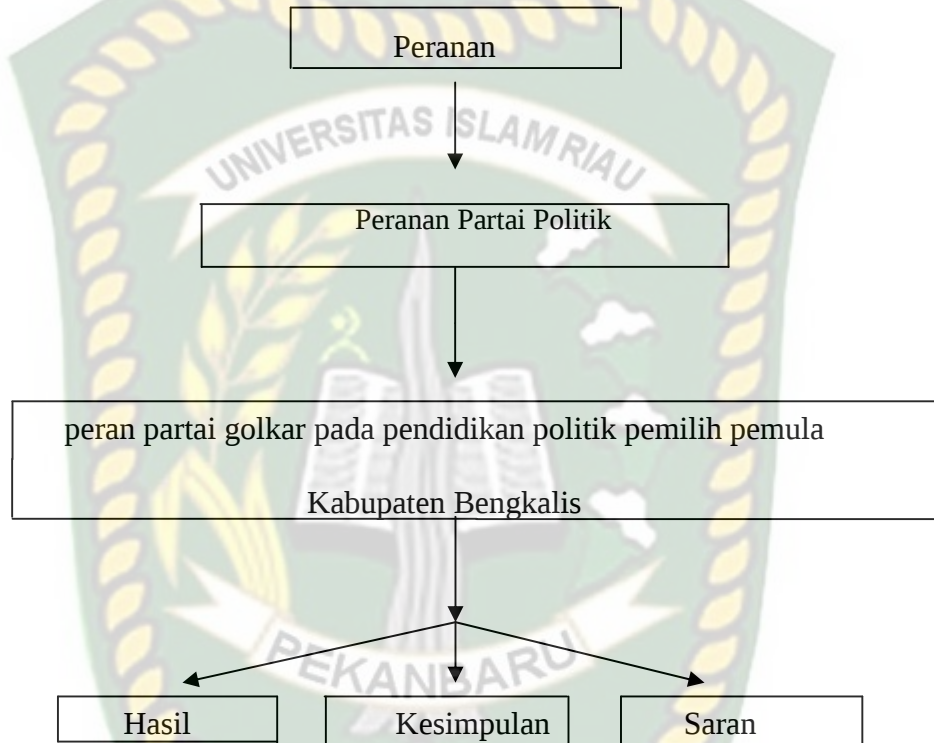
Tabel II.1: peneliti terdahulu Mengkaji Tentang pendidikan politik.

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Ichwan Nur Fadillah (Pendidikan Politik Oleh Partai nasional Demokrat Di Kota Pekanbaru)	a. Sama sama meneliti tentang pendidikan politik yang di berikan oleh partai. b. Terdapat kesamaan sikap partai yang di teliti yakni ketergantungan kader pada waktu reses	c. Partai politik yang di teliti berbeda d. Lokasi penelitian e. Pendidikan politik di Skripsi ini untuk masyarakat luas, sedangkan proposal penulis mengkhususkan kepada pemilih pemula.
2	Ahmad Syaiful Ashar (Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera)	a. Bentuk pendidikan polittik sama sama kea rah kegiatan sosial, seminar dan sosialisasi	b. Partai politik yang di teliti berbeda c. Pendidikan politik khusus di dilaksanakan oleh DPD partai, sedangkan penelitian dalam proposal penulis oleh Internal Partai Politik d. Lokasi yang di pakai untuk penelitian berbeda.
3	Afen Sandika (Peran PDI Perjuangan Dalam Memberikan Pendidikan Politik Masyarakat Menjelang Pilkada Mesuji Tahun 2017)	a. Sama sama menggunakan metode wawancara dalam proses mengumpulkan data.	b. Pendidikan politik dalam skripsi ini di tujuan kepada masyarakat umum untuk menghadapi pilkada, sedangkan pada proposal penulis untuk menambah pengetahuan dan semangat politik kepada pemilih pemula. c. Lokasi penelitian berbeda d. Partai yang di teliti berbeda

C. Kerangka Pikir

Gambar II.I

Kerangka Pikiran Tentang Peranan Partai Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik (Studi Pendidikan Politik Oleh Partai Golkar di Kabupaten Bengkalis)”.
UNIVERSITAS ISLAM RIAU



D. Konsep Operasional

Penulis menuangkan konsep-konsep yang telah di paparkan sebelumnya dalam bentuk nyata secara operasional nya tentang hasil kajian sebagai berikut:

- Fungsi di dalam penelitian ini adalah fungsi Partai Golkar dalam melaksanakan pendidikan politik di kampus
- Fungsi di dalam penelitian ini adalah adalah kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang di lakukan.

- c. Kampanye Politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat
- d. Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 adalah Undang-Undang yang mengatur tentang Partai Politik
- e. Pemilih pemula di dalam penelitian ini adalah Warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu.
- f. Pendidikan politik di dalam penelitian ini adalah Pendidikan politik merupakan proses dialog antara pendidik, seperti sekolah, pemerintah, partai politik dan peserta didik dalam rangka pemahaman, penghayatan dan pengamatan nilai, norma dan simbol politik yang dianggap ideal dan baik.
- g. Partai Golongan Karya adalah partai Golongan Karya Kabupaten Bengkalis

E. Operasional Variabel

Tabel II.II: Operasional Variabel Penelitian Tentang “Peranan Partai Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik (Studi Pendidikan Politik Oleh Partai Golkar di Kabupaten Bengkalis)”.

Konsep	Variabel	Indikator	Item penelitian
1	2	3	4
Teori Peranan (Soerjono Soekanto 2002:243). Peran merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang menjalankan peran sesuai dengan kedudukan nya, maka ia menjalankan suatu peranan.	Fungsi	1. Materi Pendidikan Partai 2. Metode pendidikan partai politik	1. berorientasi kepada pemantapan dan pengembangan program partai 2. peningkatan loyalitas dan dedikasi kader 3. peningkatan kualitas kemampuan kader untuk dapat berfikir futuristic 1. metode langsung 2. metode tidak langsung

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian, tergambar bahwa data dan informasi yang di kumpulkan melalui wawancara pada saat melakukan pra survey di jadikan dasar pendeskripsian indikator variabel, karena itu tipe penelitian ini dapat di kategorikan Metode kualitatif yaitu menerangkan atau menguraikan keadaan riil di lapangan yang berhubungan dengan Fungsi Partai Politik Dalam Melakukan Pendidikan Politik di Kabupaten Bengkalis dengan tipe Kualitatif. Penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang bertolak dari data memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelasan, dan berakhir dengan suatu teori. Penelitian Kualitatif ini baru akan di ketahui dengan mantap dan jelas setelah penelitian selesai di lakukan (Suharsimi 2006 : 13).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan Di Kabupaten Bengkalis, di lakukan untuk mengetahui sejauh mana Peranan Partai Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik (Studi Pendidikan Politik Oleh Partai Golkar di Kabupaten Bengkalis)".Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Alasan penulis memilih Kabupaten Bengkalis sebagai lokasi penelitian di karenakan masih banyak nya para pemilih pemula di Kabupaten Bengkalis yang belum mengetahui bagai mana mereka memenuhi Hak politik nya sebagai warga Negara, penulis mengkhawatirkan fenomena tersebut jika di biarkan maka akan

mematikan semangat para generasi muda untuk ikut berpartisipasi di dunia politik, untuk itu kehadiran partai politik untuk memberikan pendidikan politik sangat di perlukan di tengah masyarakat khusus nya pemilih pemula.

C. Informant & Key Informant

Dalam penelitian kualitatif, subjek responden di sebut juga sebagai subyek “kasus”, ini untuk membedakan nya dari obyek “cuplikan” (sample) pada penelitian kuantitatif.

Patton (1990) telah merinci sejumlah pendekatan yang dapat di tempuh dalam memilih subyek kasus tersebut. Peneliti sebenarnya dapat mengatasi masalah-masalah praktis semacam itu dengan melakukan penilaian dan negoisasi.

1. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak di maksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitian nya. Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian tidak di tentukan secara sengaja. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang di perlukan selama proses penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, maka informan di tentukan dengan teknik purposive yaitu penentuan informan tidak di dasarkan pedoman atau perwakilan populasi, namun berdasarkan kedalam informasi yang di butuhkan, yaitu dengan menemukan informan kunci yang kemudian di lanjutkan pada informan lainnya dengan tujuan mengembangkan dan mengumpulkan informasi sebanyak banyak

nya. Yang di jadikan sebagai informan di dalam penelitian ini adalah yang telah mewakili dan di sesuaikan dengan peranan nya dalam Fungsi Partai Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik (Studi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Oleh Partai Golkar di Kabupaten Bengkalis)”.sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011.Maka dalam penelitian ini digunakan informan yang terdiri dari :

1. Informan:

a. Pemilih Pemula Di Kabupaten Bengkalis.

1) Nama : Ahmad salabi

Alamat: Bengkalis

2) Nama : Delvia Ervina

Alamat: Siak Kecil

3) Nama : Safiq

Alamat: Siak Kecil

4) Nama : aprianto

Alamat: Siak Kecil

5) Nama : Fara Dila

Alamat: Bengkalis

b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkalis Fraksi Golkar

1) Nama : Indra Gunawan

Alamat: Pekanbaru

2) Nama : Mustapa

Alamat: Bengkalis

2. Key Informen yaitu Wakil Ketua Partai Golkar Bengkalis Bapak H. Mustapa

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer

Adalah data yang di peroleh dari hasil wawancara dan kuisisioner langsung dengan responden yang berkaitan dengan masalah penelitian mengenai Fungsi Partai Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik (Studi Pendidikan Politik Oleh Partai Golkar di Kabupaten Bengkalis)“..

2. Data Skunder

Adalah data yang di peroleh dari buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang di anggap perlu. Sedangkan dari perpustakaan untuk mendapatkan teori teori tertentu yang relevan dengan permasalahan penelitian termasuk perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan penelitian, Jika pengumpul data melakukan sedikit kesalahan sikap dalam interview misalnya, maka akan mempengaruhi data yang di berikan responden dan kesimpulan nya akan salah (Suharsimi Arikunto 1985: 123). Untuk memperoleh data data informasi yang lengkap dan di perlukanoleh penulis dalam penelitian ini, maka di perlukan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap fokus penelitian, pengumpulan data penelitian di lakukan dengan :

1. Observasi atau pengamatan adalah salah satu tehnik penelitian sangat penting, pengamatan di gunakan karna beberapa alasan. Ternyata ada beberapa tipelogi pengamatan, terlepas dari jenis pengamatan,dapat di katakan bahwa pengamatan terbatas dan tergantung pada jenis dan variasi pendekatan. (meleong, 2007;242)
2. Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan Tanya jawab langsung dengan responden untuk memperoleh data secara langsung dari responden. Dengan cara mempersiapkan daftar pertanyaan.
3. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang di buat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

F. Teknik Analisis Data

Metode ini menggunakan penganalisaan secara kualitatif, setelah data di kumpulkan secara lengkap dan menyeluruh maka data tersebut di kelompokkan dan di sesuaikan dengan data yang di peroleh, selanjut nya akan di bahas dan akan di analisa dalam dua bentuk, data yang bersifat kualitatif akan di uraikan dengan lengkap dan rinci dalam bentuk kalimat, sedangkan yang bersifat kuantitatif akan di bulasikan dalam bentuk tabel. dan di bandingkan dengan pendapat para ahli untuk kemudian di ambil kesimpulan deduktif nya. Teknik analisa ini menggambarkan bagaimana Fungsi Partai Politik Dalam Melakukan Pendidikan Politik di Kabupaten Bengkalis”.sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011.

Analisis data adalah proses mengatur urusan data, mengorganisasikan nya kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar, Meleong (2007;280). definisi tersebut memberikan uraian dasar tentang betapa penting nya kedudukan analisis data di lihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok urusan penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data. Selanjutnya data yang telah di analisis, di jelaskan dan di maknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan sesuai fakta yang ada di lapangan. maka setiap tahap tersebut di lakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah di dapat dari lapangan, dokumen pribadi, gambar, foto dan sebagai nya melalui metode wawancara yang di dukung dengan studi dokumentasi

G. Jadwal waktu kegiatan penelitian

Tabel III.II : Waktu Penelitian Peranan partai dalam melaksanakan Pendidikan politik (Studi Pendidikan Politik Oleh Partai Golkar di Kabupaten Bengkalis).

No	Kegiatan	Bulan dan minggu tahun 2019															
		Januari				februari				April				juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP	x															
2	seminar UP																
3	Perbaikan UP														X		
4	Pembuatan daftar kuisisioner																
5	Pengurusan rekomendasi penelitian																
6	Penelitian lapangan																
7	Penelitian dan analisis data																
8	Penyusunan laporan penelitian																
9	Konsultasi perbaikan skripsi																
10	Ujian skripsi																
11	Revisi dan perbaikan skripsi																
12	Penggandaan serta penyerahan skripsi																

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Gambaran Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis termasuk di dalam salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis di kenal akan kekayaan sumber daya alam yang besar, baik berupa migas maupun non migas. Sektor migas berupa minyak bumi, dan non migas berupa hasil komoditi perkebunan, pertanian, peternakan dan pariwisata.

Kabupaten Bengkalis terletak di daerah yang sangat strategis, di samping berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, Kabupaten Bengkalis juga berada pada kawasan segitiga pertumbuhan Indonesia-malaysia-singapura. (IMS-GT).

Sebagian besar wilayah Bengkalis sebelum Indonesia merdeka berada di wilayah pemerintahan kerajaan Siak Sri Indrapura. Namun setelah Indonesia merdeka, dan penyerahan oleh Raja Kerajaan Siak Sri Indrapura Sultan Syarif Kasim II, seluruh wilayah siak termasuk Bengkalis berada dibawah Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tahun 1956 yakni berdasarkan undang-undang Nomor 12 tahun 1956 dibentuklah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Bengkalis, yang pada waktu itu masih berada dibawah Provinsi Sumatra Tengah dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Sumatra utara. Setelah di bentuk daerah

tingkat 1 riau berdasarkan Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang penetapan pembentukan Kabupaten Daerah tingkat I Sumatra Barat, Riau dan Jambi, maka Kabupaten daerah tingkat II Bengkalis berada dalam Provinsi Daerah Tingkat I riau.

Setelah pemekaran, penduduk Kabupaten Bengkalis menjadi 545.737 jiwa yang sebelum pemekaran adalah 1.182.267 jiwa, adapun luas wilayahnya 7.773,93 km². Di posisi utara 2030'LU-0017LU dan 100052'BT-102010'BT, dengan batas batas:

- a. Sebelah utara : berbatasan dengan Selat malaka
- b. Sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Siak
- c. Sebelah barat : berbatasan dengan Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu
- d. Sebelah Timur : berbatasan dengan kabupaten karimun dan pelalawan

Bengkalis beriklim tropis, yang sangat terpengaruh sifat iklim laut, musim hujan terjadi antara bulan September hingga januari, dengan curah hujan berkisar antara 809-4.078 mm/tahun. Musim kemarau terjadi di bulan februari hingga agustus. Kabupaten bengkalis terbagi atas

- a. Kecamatan Bengkalis dengan luas wilayah 514,00 km²
- b. Kecamatan Bantan dengan luas wilayah 424,40 km²
- c. Kecamatan Bukit Batu dengan luas wilayah 1.128,00km²
- d. Kecamatan Mandau dengan luas wilayah 937,47 km²

- e. Kecamatan Rupat dengan luas wilayah 896,35 km²
- f. Kecamatan Rupat Utara dengan luas wilayah 628,50 km²
- g. Kecamatan Pinggir dengan luas wilayah 2.503,00 km²
- h. Kecamatan Siak Kecil dengan luas wilayah 742, 21 km²
- i. Kecamatan Bathin Solapan
- j. Kecamatan Bandar Laksamana
- k. Kecamatan Tualang Mandau.

2. Gambaran Umum Partai Golkar Bengkalis

Partai golkar di dalam penelitian ini adalah partai golkar Kabupaten Bengkalis yang di sahkan berdasar keputusan Dewan Pimpinan Daerah partai golongan karya Provinsi Riau tentang pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah partai golongan karya Kabupaten Bengkalis masa bakti 2016-2020 yang di tetapkan pada tanggal 25 oktober 2016 di Pekanbaru. yang memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) Ketua
- 2) Ketua Harian
- 3) Wakil ketua Bagian Organisasi
- 4) Wakil ketua Bagian Kadernisasi dan Keanggotaan
- 5) Wakil ketua Bagian Pemenangan Pemilu
- 6) Wakil ketua Bagian Hukum dan Ham
- 7) Wakil ketua Bagian Koperasi dan UMKM
- 8) Wakil ketua Bagian Pemuda dan Olahraga
- 9) Wakil ketua Bagian Perempuan
- 10) Wakil ketua Bagian Kerohanian dan Pengabdian Masyarakat
- 11) Wakil ketua Bagian Seni Budaya dan Pariwisata
- 12) Sekretaris
- 13) Wakil Sekretaris Bagian Organisasi
- 14) Wakil Sekretaris Bagian Kadernisasi dan Keanggotaan
- 15) Wakil Sekretaris Bagian Pemenangan Pemilu

- 16) Wakil Sekretaris Bagian Hukum dan Ham
- 17) Wakil Sekretaris Bagian Koperasi dan UMKM
- 18) Wakil Sekretaris Bagian Pemuda dan Olahraga
- 19) Wakil Sekretaris Bagian Perempuan
- 20) Wakil Sekretaris Bagian Kerohanian dan Pengabdian Masyarakat
- 21) Wakil Sekretaris Bagian Seni Budaya dan Pariwisata
- 22) Bendahara
- 23) Wakil Bendahara
- 24) Ketua Bagian Organisasi dan Keanggotaan
- 25) Anggota Bagian Organisasi dan Keanggotaan
- 26) Ketua Bagian Kaderisasi
- 27) Anggota Bagian Kaderisasi
- 28) Ketua Bagian Pemenangan Pemilu
- 29) Anggota Bagian Pemenangan pemilu
- 30) Ketua Bagian Pemuda Dan Olahraga
- 31) Anggota Bagian Pemuda dan Olahraga
- 32) Ketua bagian komunikasi, media dan pengembangan opini.
- 33) Anggota Bagian Komunikasi dan Pengembangan Opini

Pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah partai Golkar Kabupaten Bengkalis masa bhakti 2016-2020 di sahkan atas dasar :

1. Menimbang

- a. Bahwa Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkalis telah menyelenggarakan Musyawarah Daerah IX pada tanggal 13 Agustus 2016 di Bengkalis
- b. Bahwa Musyawarah Daerah Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Bengkalis telah Berhasil Mnyusun dan Menetapkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah partai golongan karya Kabupaten Bengkalis.
- c. Bahwa berdasarkan Nggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan organisasi partai golongan karya yang berwenang

mengesahkan komposisi personalia dewan pimpinan daerah partai golongan karya Kabupaten/Kota adalah pimpinan Daerah Partai golongan Karya Provinsi.

- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu di keluarkan keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Riau tentang komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Bengkalis masa bhakti 2016-2020

2. Mengingat

- a. Keputusan musyawarah Nasional luar biasa partai golongan karya tahun 2016 Nomor: VI/MUNASLUB/GOLKAR/2016 tanggal 16 mei 2016, tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya.
- b. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya Tahun 2016 Nomor : VII/MUNASLUB/GOLKAR/2016 tanggal 16 mei 2016 tentang pokok pokok Program Umum Partsi Golongan Karya Tahun 2016-2019
- c. Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai GOLKAR Nomor, juklak-5/DPP/GOLKAR/VI/2016 tanggal 16 juni 2016 tentang perubahan juklak 4/DPP/GOLKAR/XII/2015, tentang penyelenggaraan musyawarah musyawarah partai golongan karya di daerah.

3. Memperhatikan

Surat dari Ketua Tim Formatur Musyawarah Daerah Partai GOLKAR Kabupaten bengkalis Nomor : 140/DPD-GOLKAR/BKLS/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 perihal mohon penerbitan SK DPD Partai GOLKAR Kabupaten Bengkalis.

Adapun jika di jabarkan, masing masing tugas dari susunan organisasi di atas adalah:

1. Ketua
 - a. Ketua partai memiliki fungsi menyampaikan pertanggung jawaban pengurus pada akhir masa kepengurusan.
 - b. menetapkan susunan kepengurusan satu periode jabatan.
 - c. menetapkan kebijakan operasional kepengurusan.
 - d. menetapkan program kerja tahunan.
2. Ketua Harian
 - a. Melaksanakan tugas rutin harian.
 - b. menyelenggarakan rapat rapat teknis.
 - c. melaporkan aktivitas sehari hari dengan ketua umum
 - d. bertanggung jawab kepada ketua umum.
3. Wakil ketua bagian organisasi
 - a. Berfungsi untuk menyusun program dan kegiatan organisasi,
 - b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan.
 - c. pelaksanaan koordinasi,

- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi
 - e. pelaksanaan pembinaan teknis.
4. Kaderisasi dan Keanggotaan
- a. Memiliki fungsi untuk recruitment anggota baru
 - b. menjalankan proses pembinaan dan pengembangan anggota,
 - c. menyediakan sarana untuk memberdayakan potensi anggota sekaligus sebagai pembinaan dan pengembangan aktif
 - d. serta mengevaluasi dan melakukan mekanisme control organisasi.
5. Sekretaris
- a. Sebagai Pembina hubungan komunikasi yang baik antara satu pihak dengan pimpinan.
 - b. sumber informasi.
 - c. sebagai pelanjut keinginan pimpinan kepada karyawan.
 - d. penyumbang ide baru.
 - e. penentu kebijakan bagi anggota secara adil
 - f. menampung dan menindak lanjuti pendapat,
 - g. melakukan pendekatan kepada pegawai supaya dapat melihat kelemahan dan kehendak pegawai.
6. Bendahara
- a. Bendahara memiliki fungsi menyimpan dan mengeluarkan uang kepanitiaan
 - b. membukukan segala macam bentuk pengeluaran dan pemasukan organisasi,

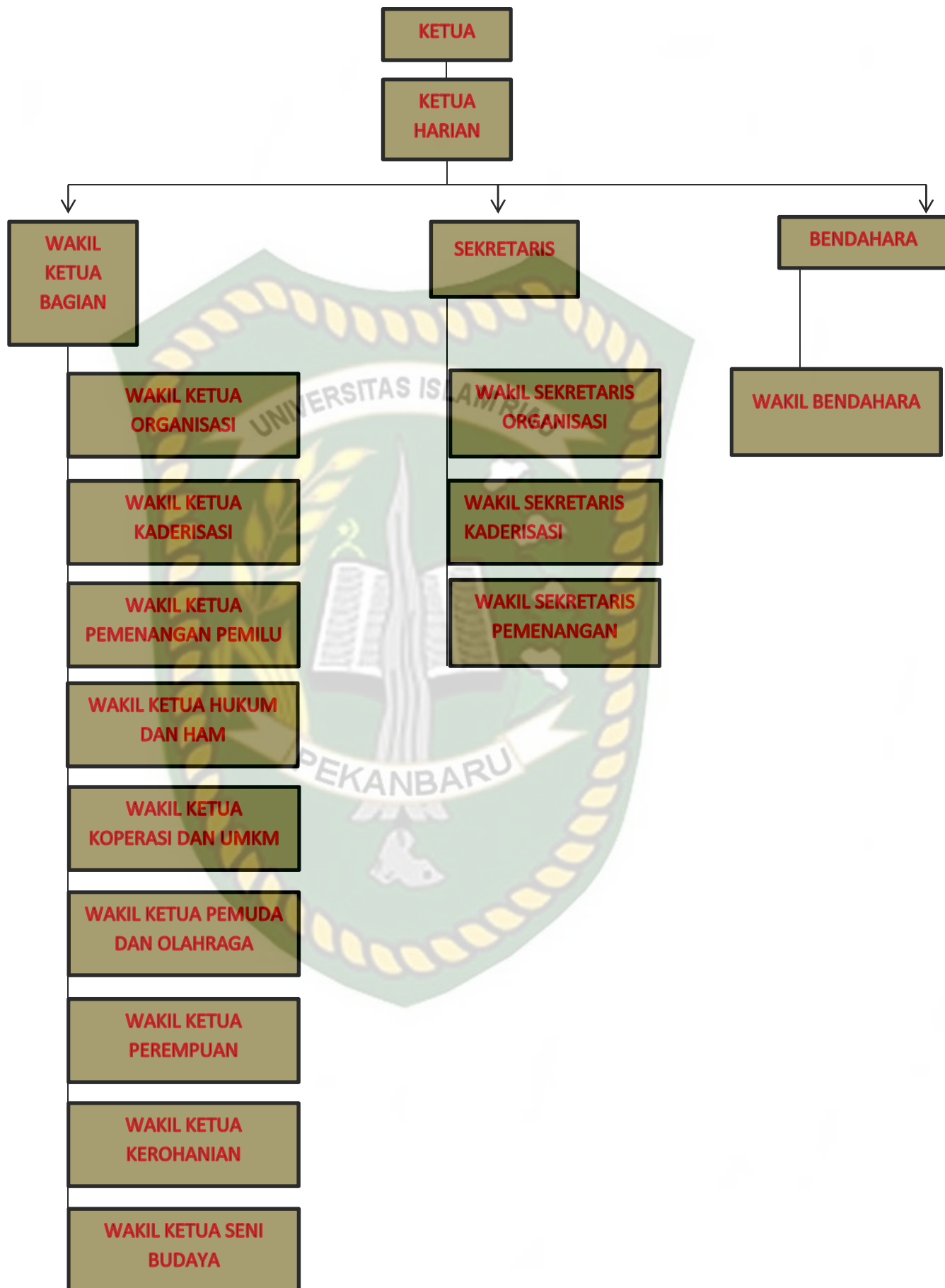
- c. membuat laporan keuangan,
- d. meminta persetujuan ketua sebelum mengeluarkan uang.

7. Bagian Pemenangan Pemilu

- a. Bertugas sebagai ujung tombak pemetaan medan di dalam kontes pemilu.
- b. termasuk penentuan jumlah suaradan pembagian menurut wilayah,
- c. menentukan keinginan dan kebutuhan pemilih,
- d. recruiting team dan pendidikan,
- e. melaksanakan acara pertemuan pertemuan, serta improvisasi sesuai perkembangan di lapangan.

8. Bagian Pemuda dan Olahraga

- a. Bagian ini berfungsi untuk perumusan kebijakan bidang pembinaan prestasi olahraga,
- b. pengembangan pemuda,
- c. pemberdayaan pemuda dan olahraga,
- d. serta melakukan pengkoordinasian tugas tugas dalam rangka melaksanakan tugas kesekretariatan
- e. melaksanakan kerjasama bidang prestasi olahraga di cakupan partai.



Seperti halnya organisasi partai pada umumnya, partai Golkar Kabupaten Bengkalis memiliki Visi dan Misi yang hendak dijalankan untuk kepentingan masyarakat umum dan partai Golkar itu sendiri. Partai Golkar pun memiliki tugas pokok yakni mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan daerah serta nasional melalui peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi ideology, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan nasional. Partai Golkar memiliki Visi terwujudnya Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman dan berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, bermartabat dalam pergaulan dunia. Adapun Misi partai Golkar adalah

1. menegaskan, mengamankan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan ideology bangsa demi memperkokoh Negara Kesatuan Indonesia
2. mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk merealisasikan masyarakat yang demokratis dan berdaulat, sejahtera dan makmur, menegakkan supremasi hukum dan menghormati Hak azasi manusia, serta terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia.
3. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan demokratis.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

1. Pendidikan

Pada bab V penulis akan menjelaskan hasil dari penelitian yang telah penulis laksanakan tentang peranan partai dalam melaksanakan pendidikan politik (studi pendidikan politik bagi pemilih pemula oleh partai golkar di Kabupaten Bengkalis) dengan cara melakukan wawancara langsung ke beberapa responden di lapangan. Sebelum masuk ke hasil penelitian, penulis ingin menjelaskan terlebih dahulu identitas dari responden yaitu sebagai berikut:

Tabel. V.1 : Jumlah populasi responden berdasarkan tingkat pendidikan

NO	Pendidikan	Populasi	Persentase
1	S2	1	12,5%
2	S1	2	25%
3	DIII	—	
4	SLTA Sederajat	5	62,5%
5	SLTP	—	
6	SD	—	
Jumlah		8	100%

Sumber : Hasil penelitian lapangan 2016

Berdasarkan tabel dapat di lihat bahwa jumlah responden yang memiliki pendidikan S2 berjumlah 1 orang atau 12,5%, sedangkan responden yang memiliki tingkat pendidikan S1 berjumlah 2 orang atau 25%, sementara jumlah responden yang memiliki latar belakang pendidikan SLTA sederajat berjumlah 5 orang atau sama dengan 62,5% , adapun responden yang memiliki latar pendidikan DIII,SLTP dan SD tidak terdapat di dalam penelitian ini.

2. Jenis Kelamin

jenis kelamin responden yang ada pada penelitian ini adalah laki laki dan perempuan, untuk melihat jenis kelamin penelitian berdasarkan jenis kelamin dapat di lihat di table berikut ini:

Tabel V.2 : Jumlah Populasi responden berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Populasi	Persentase
1	Laki-laki	5	62,5%
2	Perempuan	3	37,5%
Jumlah		8	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2016

Dapat di ketahui dari table di atas bahwa jumlah responden terbanyak didalam penelitian ini di dominasi oleh laki laki yaitu berjumlah 5 orang atau 62,5%, sedangkan jumlah responden perempuan berjumlah 3 orang atau 37,5%

3. Tingkat Umur

Umur merupakan salah satu hal yang sangat mempengaruhi jawaban yang di berikan dalam suatu pertanyaan maupun dalam hal kinerja, adapun pengelompokan jenis responden berdasarkan umur dapat di lihat di dalam tabel berikut ini:

Tabel V.3: Jumlah Polpulasi Responden berdasarkan umur.

NO	Umur(Th)	Populasi	persentase
1	17-20	5	62.5%
2	38-40	3	37,5%
Jumlah		8	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2017

Dapat di simpulkan berdasarkan tabel di atas bahwa responden yang memiliki umur 17 sampai dengan 20 tahun berjumlah 5 orang atau 62,5% dari keseluruhan responden, kemudian terdapat juga responden yang memiliki usia yang berada pada 38 sampai dengan 40 tahun sebanyak 3 orang atau sama dengan 37,5%. Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa di dalam penelitian ini terdapat responden yang berkisar di umur 17-20 yang pada penelitian ini merupakan pemilih pemula, sedangkan responden yang berumur di kisaran 38-40 tahun di dalam penelitian ini merupakan anggota dan ketua partai yang menjadi key informen penulis.

B. Peranan Partai Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik (Studi Pendidikan Politik Oleh Partai Golkar Di Kabupaten Bengkalis)

Untuk mengetahui bagaimana hasil pendidikan politik partai Golkar terhadap pemilih pemula di Kabupaten Bengkalis, serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang di hadapi oleh kader Golkar Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pendidikan politik di Kabupaten Bengkalis, sehingga timbul harapan agar supaya pendidikan politik di Kabupaten Bengkalis bisa berjalan dengan maksimal.

Efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan politik perlu lebih di tingkatkan dengan memperhatikan aspek keanekaragaman Daerah, dengan target peluang dan tantangan global dalam persaingan dunia politik yang pada dasarnya di tujuan untuk kebaikan dan berkembangnya pemikiran politik generasi penerus baik di level daerah maupun level nasional nantinya.

Wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan suatu Daerah dimana perkembangan ekonomi dan politik nya masih bisa dikatakan sangat tidak stabil, hal ini berkaitan erat dengan faktor ekonomi masyarakat yang masih banyak bergantung di sektor perkebunan karet dan kelapa sawit, serta masih banyak juga yang bergantung di sektor nelayan yang artinya kesulitan di sektor ekonomi dan mencari lapangan kerja sangat di butuhkan, hal ini juga turut sangat berpengaruh kepada perkembangan dunia politik di Kabupaten Bengkalis, untuk itu pentingnya pendidikan politik yang di laksanakan oleh partai kepada masyarakat, dalam hal ini pendidikan politik oleh partai Golkar di Kabupaten Bengkalis.

Dalam partai politik Anggaran Dasar (AD) merupakan kebijakan tertinggi yang menjadi pedoman bagi peraturan di bawahnya dalam melaksanakan aktivitas politik partai. Sementara Anggaran Rumah Tangga (ART) merupakan aturan yang menjabarkan lebih lanjut mengenai isi dari Anggaran Dasar partai politik tersebut. Tak terkecuali Partai Golkar Bengkalis, Anggaran Dasar (AD) dijadikan rujukan oleh partai bagi pelaksanaan kegiatan partai. Anggaran Dasar memberi arahan kepada partai tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan partai. Berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan politik terutama bagi anggota atau kadernya, dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Golkar tidak dijelaskan secara tegas mengenai pendidikan politik, akan tetapi dari beberapa pasal dalam Anggaran Dasar tersirat mengenai pelaksanaan pendidikan politik. Hal ini dapat dilihat dari adanya pengaturan tentang masalah keanggotaan partai, selanjutnya ketentuan mengenai keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga tersebut mengenai sistem dan prosedur keanggotaan serta jenjang keanggotaan partai. Dalam melaksanakan amanat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) perlu adanya program kerja yang bersifat teknis yaitu program kerja yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan aktivitas politik partai.

Partai Golkar merupakan salah satu kekuatan politik yang cukup diperhitungkan dalam kancah politik di tingkat nasional maupun daerah, memandang perlu adanya program kerja yang dapat menopang eksistensi serta kemajuan partai yang salah satu program kerja berkaitan dengan pendidikan

politik. Program kerja Partai Golkar yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan politik adalah kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan kader atau anggota dimulai dari struktur organisasi terendah yaitu tingkat ranting sampai pada tingkat pusat serta pendidikan politik bagi masyarakat yang belum menjadi anggota atau kader partai. Program kerja yang berkaitan dengan pendidikan politik di DPD Golkar Kabupaten Bengkalis meliputi berbagai kegiatan antara lain dibidang kaderisasi, pembangunan, dan kebijakan publik. Semua kegiatan tersebut di susun dalam program kerja partai yang meliputi program bulanan, program tahunan serta program yang sifatnya insidental.

Berikut ini mengenai program kerja Partai Golkar berkaitan dengan pendidikan politik, berdasarkan dokumentasi yang ada sebagai berikut.

1) Bidang kaderisasi

Dibidang kaderisasi DPD Partai Golkar Kabupaten Bengkalis memfokuskan program kerja selama 5 tahun ke depan untuk bagaimana meningkatkan kuantitas dan kualitas kader-kadernya, serta mentargetkan dapat merekrut 3500 kader baru. Dalam upaya mencapai target tersebut Partai Golkar Kabupaten Bengkalis memiliki berbagai cara, metode dan strategi untuk terus meningkatkan kualitas kader serta meningkatkan dukungan dari pemilih. Metode tersebut antara lain melalui kegiatan:

a) pelatihan dan pembinaan

Pelatihan dan pembinaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus Partai Golkar baik tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan pimpinan

Cabang (DPC) maupun Dewan Pimpinan Ranting (DPRa). Kegiatan training atau pelatihan diberikan kepada anggota kader pendukung yang terdiri dari anggota pemula dan anggota muda serta masyarakat umum. Pelatihan biasanya berupa kegiatan, Training Orientasi Pengenalan (TOP) partai merupakan bentuk kegiatan pelatihan bagi calon anggota partai, yang tujuannya memperkenalkan visi dan misi Golkar bagi calon anggota atau masyarakat.

b) seminar

Seminar merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan politik bagi anggota maupun masyarakat. Kegiatan seminar merupakan forum diskusi untuk mengkaji suatu permasalahan dan memberikan pemecahan masalah serta mengambil keputusan dalam menyikapi permasalahan tersebut, yang diikuti baik anggota maupun masyarakat umum. Seminar dengan mengangkat tema isu-isu maupun fenomena-fenomena yang berkembang dalam masyarakat yang tidak hanya dalam bidang politik saja akan tetapi juga seluruh bidang kehidupan. seminar mempunyai muatan pendidikan politik yang terkandung didalamnya, yaitu terbentuknya pemahaman yang luas atas berbagai ragam masalah politik dan

problematika masyarakat melalui dialog dengan berbagai macam latar belakang pemikiran dari berbagai disiplin ilmu, selain itu juga memberikan pengenalan berbagai ragam metodologi praktis untuk menyelesaikan persoalan dari berbagai sudut pandang kepada kader maupun masyarakat.

d) kegiatan sosial

Kegiatan sosial merupakan bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh kader Partai Golkar yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kader-kader Golkar aktif melakukan berbagai aktivitas simpatik kemasyarakatan yang diharapkan dapat meningkatkan dukungan kepada mereka. Dalam rangka pengenalan program partai Golkar dengan masyarakat, Partai Golkar juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial atau bakti sosial.

2) Bidang pembangunan

Dibidang pembangunan Partai Golkar Kabupaten Bengkalis berupaya selalu menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat melalui program kerja silaturahmi kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dalam upaya mencapai tujuan program kerja dibidang pembangunan dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendidikan dan kerjasama kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan (ormas). Pendekatan pendidikan dilakukan dengan cara melakukan konsolidasi struktur dan lembaga pendidikan internal partai, yang tujuannya terdanya lembaga-lembaga pendidikan dalam internal partai. Kemudian melakukan kegiatan dalam lingkup eksternal yang meliputi pendampingan lembaga-lembaga pendidikan dan membentuk lembaga pendidikan baru dari tingkat TK/PAUD, SD, SMP, dan SMA/SMK. Kerjasama kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan (ormas) dilakukan dengan mengadakan kegiatan, pertama silaturahmi antar lembaga dengan oraganisasi kemasyarakatan yang tujuannya terbentuknya forum komunikasi lembaga. Kedua, rekrutmen tokoh

yaitu upaya untuk menjalin silaturahmi dan kerjasama dengan tokoh-tokoh baik tokoh keagamaan maupun tokoh kemasyarakatan. Tujuannya terjalin komunikasi yang efektif antara tokoh-tokoh dan partai serta terbangunnya image partai yang baik dalam masyarakat. Ketiga, pemberdayaan kader yaitu upaya untuk melakukan infiltrasi kader ke lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan eksternal. Tujuannya masuknya kader-kader kedalam lembaga-lembaga atau organisasi eksternal tersebut.

3) Bidang kebijakan publik

Dibidang kebijakan publik Partai Golkar Kabupaten Bengkalis berupaya memberikan pencerahan dan sosialisasi perkembangan Golkar tingkat daerah dan nasional kepada masyarakat di Kabupaten Bengkalis melalui pemasangan spanduk dan penerbitan bulletin, blog dan akun Media sosial. Selain itu program kerja dibidang kebijakan publik yang di susun berdasarkan hasil Musyawarah Kerja Daerah (Muskerda) tahun 2016, sebagai berikut.

a) Melakukan komunikasi dengan partai yang berpengaruh, dan melakukan pertemuan secara intens. Bentuk kegiatan silaturrahi politik kepada pengurus partai di tingkat Kabupaten Bengkalis (tema: masalah aktual Kabupaten Bengkalis) dan silaturohmi kepada redaksi media massa yang populer di wilayah Kabupaten Bengkalis. Tujuan terbangunnya persepsi yangg sama terhadap permasalahan-permasalahan strategis dan aktual Kabupaten Bengkalis. serta tereksposenya kegiatan-kegiatan dan pandangan-pandangan Golkar di semua bidang.

b) Membuat Kebijakan khusus untuk pengelolaan daerah unggulan, bentuk kegiatan:

- (1) kegiatan pembuatan struktur kebijakan publik,
- (2) seruan kepada seluruh anggota legislatif DPRD Kabupaten untuk mengoptimalkan APBD dalam bentuk aspirasi untuk penguatan DPC-DPC unggulan,
- (3) laporan-laporan dari seluruh anggota legislatif (tertulis untuk kegiatan tersebut).

Pada uraian ini akan dikemukakan secara khusus program yang telah ditetapkan oleh Pengurus Golkar Kabupaten Bengkalis. Dengan melakukan pencermatan pada program secara keseluruhan yang telah ditetapkan tersebut, kemudian secara khusus perhatian diarahkan pada program yang berkaitan dengan pendidikan politik. Melalui cara ini akan diketahui perhatian golkar Kabupaten Bengkalis pada program-program yang berkaitan dengan pendidikan politik.

Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Partai Golkar adalah kegiatan pemasangan spanduk sebagai metode pendidikan politik yang bersifat massal, harapannya masyarakat akan lebih mengenal serta bersimpati pada Partai Golkar. pemunculan tokoh kader Golkar di daerah, di pasang sejumlah spanduk yang bertemakan Hari Hari besar, kegiatan dan lain lain nya disertakan dengan menampilkan foto sosok kader Golkar Kabupaten Bengkalis diseluruh DPC Partai Golkar Kabupaten Bengkalis dan di lokasi-lokasi strategis.

Kegiatan pendidikan politik yang dilakukan Partai Golkar Kabupaten Bengkalis seperti yang sudah diuraikan di atas merupakan kegiatan pendidikan politik dalam upaya untuk meningkatkan kualitas para kadernya. Pada dasarnya kegiatan pendidikan politik tersebut dilaksanakan tidak hanya selalu bermuatan politik saja.

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan loyalitas kader, Partai Golkar Bengkalis lebih cenderung kearah pelatihan dan pembinaan, seminar, kajian-kajian dan kegiatan sosialisasi untuk memberikan pemahaman terhadap kader baik mengenai politik maupun kemasyarakatan. Strategi tersebut dirasa sangat tepat oleh Golkar Kabupaten Bengkalis untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat, karena dengan pelatihan dan pembinaan, diskusi, sosialisasi dan kegiatan sosial dirasa lebih mengena. Selain pendidikan politik yang dilaksanakan berupa pelatihan dan pembinaan, diskusi partai Golkar Kabupaten Bengkalis juga melakukan kegiatan bersifat sosial yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Golkar Kabupaten Bengkalis dengan melakukan berbagai kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, kepribadian, dan partisipasi politik kader serta masyarakat.

Partai Golkar Kabupaten Bengkalis juga terus menggalak kan pendidikan politik melalui beragam sosialisasi, salah satu contoh beberapa waktu lalu partai Golkar Bengkalis mengadakan sosialisasi penguatan empat pilar, yang di berikan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi

Riau yang juga merupakan Anggota DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman kepada masyarakat dan Mahasiswa STAIN Bengkalis, di Bengkalis.

Acara ini, dihadiri sekitar 150 Orang peserta, Kegiatan itu merupakan program pemahaman kepada masyarakat tentang empat pilar kebangsaan. Ketua DPD II Golkar Bengkalis, H.Indra Gunawan Eet, Ph.D menyebutkan, kegiatan ini adalah pendidikan Politik, dengan tujuan menyegarkan kembali 4 pilar kebangsaan. *“Ini sudah ada sehari hari pada diri kita, hari ini hanya menyegarkan kembali, Sosialisasi ini tujuannya agar masyarakat paham apa itu arti empat pilar. Hal ini juga karena empat pilar ini dapat memperkuat rasa kebangsaan dan nasionalisme warga negara.”*. Eet juga menambahkan masyarakat harus tetap dan selalu diingatkan bahwa semua yang hidup di dalam wilayah nusantara ini masih dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *“Jadi nilai kebangsaan itu tidak hanya terucap saja,tapi betul dilaksanakan dalam berenegara. Semoga dengan adanya kegiatan ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. ”* imbuhnya (sumber : MediaOkeline.com).

Partai Golkar juga memandang Pemilih Pemula adalah generasi yang akan turut menjadi penentu masa depan bangsa, partai golkar Bengkalis memandang perlunya Kegiatan pendidikan politik yang ditujukan khusus untuk pemilih pemula di Kabupaten Bengkalis. Seperti kegiatan pendidikan politik oleh partai golkar beberapa waktu lalu di Kabupaten Bengkalis, kegiatan ini diisi dengan pembicara yang merupakan anak muda yang juga punya perhatian untuk mengajak kelompok peer group-nya menjadi pemilih yang cerdas. Pembicara di

dalam pembahasannya mengajak adik-adiknya untuk menjadi pemilih pemula yang cerdas dengan mencari tahu calon yang akan dipilih. Pembicara juga mengajak para pemilih pemula yang terbiasa menggunakan medsos untuk memanfaatkan medsos guna mencari tahu informasi tentang pemilu dan kandidatnya. Sehingga medsos menjadi sesuatu yang manfaat untuk pemilih pemula.

Pendidikan politik untuk pemilih pemula ini memang sangat penting bagi pemilih pemula. Karena mereka sangat bingung dan banyak yang belum memahami soal pemilu. Mereka merasa urusan politik sangat jauh dari kehidupan mereka.

a. Materi Pendidikan Partai

Materi yang disampaikan dalam proses pendidikan politik kepada kader dan pengurus partai lebih berorientasi kepada pemantapan dan pengembangan program partai, peningkatan loyalitas dan dedikasi kader, peningkatan kualitas kemampuan kader untuk dapat berfikir futuristik. Sedangkan materi yang disampaikan dalam proses pendidikan politik kepada masyarakat meliputi posisi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan konstitusi negara.

Wakil partai Golkar Kabupaten Bengkalis Mustapa (hasil wawancara 23 oktober 2018) menyatakan bahwa:

“pendidikan politik terhadap pemilih pemula di Kabupaten Bengkalis lebih banyak dilakukan oleh kader partai golkar dengan cara menyampaikan pemahaman tentang hak ke kelompok pemilih pemula melalui pemanfaatan media sosial, dan menggandeng pihak KPU dan partai lain yang ada di Bengkalis jika pendidikan politik yang hendak di berikan bersangkutan dengan instansi pendidikan seperti sekolah dan kampus”.

Sementara itu dalam wawancara lain kader partai golkar menganggap penting nya pembekalan yang di berikan kepada diri kader sebelum langsung turun ke masyarakat, Rahma selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bengkalis mengatakan(dalam hasil wawancara 24 oktober 2018):

“para kader terlebih dahulu di berikan pembekalan terkait bagaimana penyampaian dan langkah pendidikan politik ke masyarakat, selain memberikan pembekalan secara edukatif, partai golkar menekankan kepada seluruh kader untuk terus meningkatkan kualitas kemampuan berfikir futuristik, sehingga bisa dengan mudah di terima msayarakat dan kaum muda”.

Terdapat jenjang umur yang berbeda antara pemilih pemula dengan masyarakat umum, pendidikan politik akan berhasil apabila pendekatan yang dilakukan ke millennial cukup baik, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Mustapa (Hasil wawancara 23 Oktober 2018).

“bahwa pendidikan politik yang di berikan saat ini secara garis besar sama antara pendidikan politik kepada pemilih pemula dan masyarakat biasa, namun

tentu saja kader yang memberikan pendidikan politik selalu menyesuaikan, tema dan topik penyampaian, hal ini agar penyampaian pendidikan politik sejalan dengan pemikiran millennial”.

Salah satu bentuk pendidikan politik adalah perekrutan kader untuk masuk kedalam partai, seperti yang di katakan Indra selaku kader partai golkar mengatakan (dalam wawancara 3 november 2018) bahwa:

“terdapat tujuan perekrutan nantinya apabila golongan muda berminat untuk ikut andil dalam dunia politik melalui partai terutama partai golkar, ini merupakan salah satu usaha awal partai golkar dalam mendidik para calon kader”.

Penulis mendapati dari Observasi penulis di lapangan dan wawancara yang penulis lakukan , *Pertama* orientasi pemantapan dan pengembangan partai, hal ini di lakukan oleh para kader partai golkar dengan cara terus menambah perekrutan jumlah kader baru terutama pemilih pemula yang di barengi dengan menggandeng pihak pihak lain seperti KPU, tokoh masyarakat dan partai lain, dengan banyak nya kader baru yang tergolong millennial, secara otomatis program program baru pun bermunculan dengan tetap mendorong persaingan positif di internal partai dalam berkarya.*kedua* peningkatan loyalitas dan dedikasi kader di dalam internal partai Golkar Bengkalis berjalan dengan sangat baik, hal ini di tandai dengan penulis temukan bahwa kader partai tidak hanya mementingkan kepentingan politik sempit saja melainkan benar benar menjadi bagian dari partai golkar, hal ini dapat di lihat dengan kader partai yang masih setia menjadi bagian partai meski terkadang beberapa kepentingan kader di partai

golkar tidak terpenuhi. *Ketiga* penulis menemukan peningkatan kualitas untuk berfikir futuristik di dalam diri kader partai golkar terus di kembangkan, kader partai golkar sangat memanfaatkan sekali teknologi dan media massa yang ada sesuai dengan perkembangan saat ini dalam mengolah dan memberikan informasi terkait penyaluran program program partai atau pendidikan politik kepada masyarakat luas khususnya pemilih pemula.

penulis dapat menyimpulkan dari wawancara dan observasi diatas bahwa Partai golkar Kabupaten Bengkalis melakukan pendidikan politik kepada pemilih pemula dengan baik. dengan terlebih dahulu memberikan pembekalan kepada kader tentang peningkatan loyalitas dan dedikasi kader menunjukkan bahwa partai golkar ingin pesan yang di bawa oleh partai benar benar tersampaikan secara baik ke masyarakat terutama pemilih pemula, selanjutnya kader partai golkar Kabupaten Bengkalis melakukan pendidikan politik ke masyarakat dan pemilih pemula dengan mengarahkan masyarakat bertanggung jawab kepada perkembangan daerah serta mengajak untuk ikut serta berpartisipasi di dunia politik lewat partai golkar, seluruh materi pendidikan politik partai Golkar Bengkalis berdasarkan observasi penulis sesuai dengan teori yang penulis gunakan yaitu Labolo 2015:21 yakni materi yang di sampaikan dalam proses pendidikan politik kepada kader harus berorientasi kepada pemantapan program partai dan peningkatan kualitas kader sedangkan kepada masyarakat meliputi posisi, hak dan kewajiban berwarga Negara.

b. Metode Pendidikan partai

Di dalam metode pendidikan politik yang di sampaikan kepada masyarakat dan kader partai berbeda. Metode yang di gunakan untuk menyampaikan materi ke masyarakat dapat berupa penyampaian langsung dan tak langsung, namun biasanya penyampaian materi lebih sering di sampaikan secara tidak langsung, misalnya dengan menggunakan perantara media massa.

Delvia selaku siswa SMK di Kabupaten Bengkalis yang merupakan pemilih pemula di Kabupaten Bengkalis mengatakan (dalam wawancara 7 november 2018).

“belum pernah mendapatkan pendidikan politik secara langsung yang di lakukan oleh partai politik di Kabupaten Bengkalis, tapi saya sering melihat dan membaca postingan postingan dari anggota partai Golkar di media sosial instagram,” sehingga mungkin dikarenakan euforia pemilu serta menarik nya konten di beberapa akun sosial media kader partai tersebut membuat saya pada pemilihan umum kemarin tertarik untuk ikut datang ke Tempat Pemilihan Umum dan mencoblos di kotak suara”.

dengan target perekrutan kader yang banyak, partai golkar mengandalkan pendidikan tak langsung atau media sosial sebagai cara untuk mendapatkan perhatian di masyarakat terutama pemilih pemula, hal ini sesuai dengan apa yang penulis temui pada salah satu responden saat wawancara 7 november 2018.

“tidak pernah bertatapapan langsung atau mendapatkan langsung pendidikan politik dari partai golkar, namun dikarenakan saya rutin aktif di

media sosial instagram, saya mengetahui dan selalu melihat postingan postingan yang di pos kan oleh Ketua Partai Golkar di Instagram, saya menjadi tertarik ikut berpartisipasi di pemilu 2019 dikarenakan termotivasi dengan Ketua Partai Golkar Kabupaten Bengkalis tersebut yang menurut nya berjiwa pemimpin kekinian dan patut di teladani.”

Didalam melakukan pendidikan politik secara langsung di lapangan tentu saja tidak bisa dilakukan menyeluruh, tentu terdapat berbagai hambatan sehingga masyarakat terutama pemilih pemula masih ada yang belum tersentuh pendidikan politik olrh partai golkar Bengkalis, seperti yang penulis temui di lapangan dalam (hasil wawancara 17 november 2018)

“sebaiknya pendidikan politik juga di lakukan dengan cara terjun langsung dan memberikan arahan kepada pemilih pemula secara tatap muka, sehingga kami sebagai pemilih pemula mendapatkan pendidikan yang benar benar maksimal dalam berpolitik di daerah kami, bukan hanya lewat media sosial saja, otomatis jika pemilih pemula kurang suka atau kurang aktif di media sosial, maka dia tidak melihat postingan tersebut dan tidak mengetahui tentang pendidikan politik”.

Aprianto selaku pemilih pemula di Kabupaten Bengkalis mengatakan (dalam wawancara 7 November 2018)

“setelah melihat postingan yang ada di salah satu akun media sosial kader partai golkar Kabupaten Bengkalis tumbuh keinginan untuk ikut serta membangun dan meleburkan diri di dalam pembangunan di Daerah Bengkalis, dan timbul

semangat kedaerahan akibat ajakan dan slogan kedaerahan di postingan tersebut sehingga tumbuh semangat untuk berpolitik yang tujuannya membangun Daerah”.

Dari observasi penulis di lapangan penulis menemukan *pertama* pendidikan politik secara tidak langsung Penulis mendapati partai Golkar Kabupaten Bengkalis lebih sering melakukan pendidikan politik dengan materi pendidikan yang disampaikan melalui media sosial dibandingkan bertemu langsung dengan pemilih pemula, pendidikan dilakukan dengan pesan-pesan moral tentang pentingnya berpolitik, dan membawa serta kepribadian kader sebagai contoh yang bisa diteladani oleh kaum milenial atau pemilih pemula. *Kedua* metode pendidikan langsung, penulis mendapati di lapangan bahwa meskipun tidak sering namun partai Golkar tetap melakukan pendidikan politik secara langsung yakni dengan melakukan berbagai agenda sosialisasi di Kabupaten Bengkalis, pemasangan spanduk partai Golkar, dan melakukan kunjungan-kunjungan ke instansi pendidikan dengan mengundang KPU dan partai lain dengan tujuan memberikan pemahaman dan pembelajaran politik serta pemilu.

Dari hasil observasi dan wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa metode yang digunakan oleh kader partai Golkar dalam menjalankan pendidikan politik baik secara langsung dan tidak langsung di Kabupaten Bengkalis sudah berjalan baik, kedua metode yang digunakan oleh kader partai dapat penulis temukan dan dijalankan oleh partai Golkar Bengkalis, pendidikan politik yang intensif dilakukan oleh partai Golkar Kabupaten Bengkalis ini berefek pada para

bertambah nya minat pemilih pemula tertarik untuk mengikuti atau mencontohi para kader , sehingga timbul keinginan di dalam diri pemilih pemula untuk ikut serta membangun Daerah dan turut menjadi bagian partai, menurut penulis materi pendidikan politik partai golkar sudah baik, dan apa yang di lakukan sudah sesuai dengan teori yang penulis pakai yakni metode pendidikan politik oleh labolo 2015:21 yaitu terdapat pendidikan langsung dan tidak langsung.

C. Analisis Hasil

Jadi setelah penelitian di lakukan dan beberapa wawancara kepada pihak pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam melakukan pendidikan politik kepada pemilih pemula di Kabupaten Bengkalis partai golkar dapat di katakan sudah sangat berperan, hal ini dapat penulis lihat di lapangan dengan banyak nya para pemilih pemula yang mengungkapkan dirinya merasa terdorong untuk ikut berpolitik atau paling tidak datang ke tempat pemungutan suara dan memandang bahwa politik adalah salah satu jalan untuk ikut berperan dalam pembangunan di daerah maupun Nasional.

Baik nya pendidikan politik yang di lakukan oleh partai golkar Kabupaten Bengkalis tak lepas dari beberapa hal yang menurut penulis sangat penting dalam berjalan nya pendidikan politik kepada pemilih pemula antara lain,

Pertama, karakter diri kader partai golkar. Baiknya karakter diri yang dimiliki oleh kader partai golkar menjadi salah satu faktor keberhasilan dari pendidikan politik kepada pemilih pemula di Kabupaten Bengkalis, kader partai golkar terutama ketua partai saat ini di nilai sangat dekat dengan anak anak

millennial dan layak menjadi panutan untuk masyarakat terutama Pemilih Pemula, partai golkar melalui kader nya berhasil menciptakan pendekatan dengan pemilih pemula atau kaum millennial dengan terlebih dahulu menciptakan kader yang melek akan perkembangan saat ini, sehingga pemilih pemula yang membutuhkan dorongan untuk ikut serta memilih atau berpartisipasi di dunia politik dapat tersampaikan sesuai porsi nya.

Kedua, pemanfaatan media sosial dan teknologi. Sesuai dengan teori dari materi pendidikan politik yang penulis gunakan, salah satu materi yang harus dikuasai oleh kader adalah peningkatan kualitas kader untuk dapat berfikir futuristik. Di dalam menyampaikan pendidikan politik kepada pemilih pemula di Kabupaten Bengkalis kader partai golkar harus bisa menyesuaikan teknik penyampaian ke pemilih pemula, penulis mendapati bahwa kader partai golkar memiliki kualitas yang baik dalam berfikir futuristik dan mengerti akan penting nya teknologi dan media sosial masa kini yang sangat dekat dengan kaum millennial atau pemilih pemula, oleh sebab itu kader partai golkar di dalam memberikan pendidikan politik lebih sering menggunakan metode tak langsung atau media sosial, hal ini di lihat lebih efektif dan langsung menyentuh ke diri masing masing pemilih pemula.

Ketiga, baik nya kerja sama partai golkar dengan pihak Komisi Pemilihan Umum dan partai lain dalam memberikan Pendidikan Politik, di dalam pelaksanaan pendidikan politik terhadap kelompok pemilih pemula tidak selalu di lakukan oleh partai golkar saja, untuk tempat tempat instansi pendidikan biasanya partai golkar menggandeng pihak Komisi Pemilihan Umum dan partai lain dalam

memberikan pendidikan politik, instansi pendidikan seperti sekolah dan kampus di pandang oleh partai golkar sebagai tempat yang wajib dan penting dilakukan pendidikan politik karena merupakan tempat berkumpul nya para pemilih usia muda atau pemilih pemula.

Keempat, adanya pembagian struktur dan personalia yang jelas di partai golkar Kabupaten Bengkalis, partai golkar Kabupaten Bengkalis memiliki struktur organisasi yang jelas dengan tugas masing masing personalia yang ada, hal ini turut menunjang berhasil nya pendidikan politik yang di berikan di sebabkan para kader terlebih dahulu telah mengetahui bagian tugas pokok nya masing masing, oleh sebab itu pendidikan politik yang di berikan dapat tersampaikan secara maksimal.

Kelima, adanya kesadaran dari pemilih pemula itu sendiri untuk ikut aktif berperan membangun negeri lewat politik. Kesadaran dari diri pemilih pemula itu sendiri untuk menerima pendidikan politik sangat berpengaruh bagi partai golkar sebagai pemberi pendidikan politik, pemilih pemula di Kabupaten Bengkalis saat ini begitu menginginkan sebuah perkembangan dan kemajuan di daerah mereka, hal itu pula yang mau tidak mau membuat mereka harus bersaing dan menerima berbagai ilmu dari berbagai cara untuk membangun daerah nya, salah satunya lewat jalur politik.

Maka dari itu berdasarkan penelitian di atas dan melihat teori yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto peranan partai golkar sudah dapat di katakan berperan, hal ini di karenakan di dalam teori tersebut seseorang yang menjalankan

kewajiban sesuai dengan kedudukannya itu dikatakan sebagai peranan. Oleh sebab itu kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh partai golkar dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula di Kabupaten Bengkalis sudah masuk di dalam ciri ciri peranan sebagaimana yang di kemukakan oleh soekanto. Kader partai golkar Kabupaten Bengkalis melakukan pendidikan politik sesuai dengan peran nya sebagai alat politik sebagaimana yang di cantumkan di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 bahwasanya terdapat kewajiban Partai politik melakukan pendidikan politik terhadap kader dan masyarakat berupa proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

D. Hambatan-hambatan yang di hadapi oleh Partai Golkar dalam melakukan Pendidikan Politik di Kabupaten Bengkalis

Pendidikan politik yang di lakukan oleh partai golkar kepada pemilih pemula di Kabupaten Bengkalis telah di lakukan dengan baik, namun tentu saja di dalam pelaksanaan pendidikan politik ini terdapat berbagai macam hambatan yang harus di lalui oleh partai golkar Kabupaten Bengkalis, antara lain:

1. Pemanfaatan teknologi dan media massa yang belum bisa maksimal.
2. Terhambat nya pendidikan politik secara langsung yang di sebabkan oleh kondisi geografis di Kabupaten Bengkalis yang merupakan daerah kepulauan, sehingga untuk menjangkau dari satu daerah ke daerah lain memerlukan biaya dan waktu yang begitu besar.

3. Adanya persaingan buruk sesama partai atau pihak lain yang menebarkan berita berita hoak sehingga masyarakat terpengaruh dan memandang suatu partai buruk.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dan beberapa saran pelengkap untuk menambah bahan masukan bagi partai golkar Kabupaten Bengkalis atau pihak yang membutuhkan.

Beberapa kesimpulan penelitian ini sebagai berikut :

1. Pendidikan Politik yang dilakukan oleh partai golkar Kabupaten Bengkalis khususnya terhadap pemilih pemula nya berjalan dengan sangat baik, hal ini ditandai dengan tumbuh nya kesadaran berpolitik dari pemilih pemula yang di tandai dengan meningkat nya jumlah pemilih di usia pemilih pemula, meningkat nya jumlah kader muda di internal partai, dan sukses nya partai golkar dalam target politik di ajang kontestasi politik Daerah Kabupaten Bengkalis.
2. Partai Golkar Kabupaten Bengkalis dalam menjalankan pendidikan politik kepada pemilih pemula di Kabupaten Bengkalis juga menghadapi berbagai hambatan, antara lain :
 - a. Terdapat sentiment masyarakat jika partai politik mengunjungi instansi pendidikan.
 - b. Kurang nya kesadaran dari masyarakat itu sendiri tentang penting nya pendidikan politik di mulai sejak usia sedini mungkin.

- c. Kurang nya pemahaman kader terhadap pendidikan politik tak langsung
- d. Kondisi geografis Kabupaten Bengkalis
- e. Persaingan tidak sehat antar partai

B. Saran

- a. Pengurus partai sebelum memberikan pendidikan politik ke masyarakat terlebih dahulu menjadi contoh dalam berpolitik bersih, jujur, dan adil dalam mengemban amanah dari masyarakat, hal ini untuk menghapus buruk nya stigma dunia perpolitikan di pikiran masyarakat akibat dari banyak nya kasus KKN yang terjadi di Indonesia.
- b. Sesuai dengan target pendidikan politik, yaitu pemilih pemula, maka metode pendidikan politik yang di berikan pun harus sejalan dengan pikiran pemilih pemula atau remaja, yakni dengan pendekatan kekinian dan sarat pemanfaatan teknologi kedepan.
- c. Pemanfaatan sosial media sangat di perlukan, sebab pemilih pemula tentu tidak bisa di pisahkan dengan teknologi, maka dari itu, dalam memberikan pendidikan politik sebaik nya semua kader atau petugas partai bisa dan terbiasa dengan pemanfaatan sosial media dengan baik, dengan adanya sosial media, maka target pendidikan politik yang hendak di berikan akan lebih mudah di capai.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Alfian, 1990, *Masalah Dan Prospek Pembangunan Pembangunan Politik Indonesia*, Jakarta, Kumpulan Karangan, PT. Gramedia.
- Budiardjo, Miriam 2005 *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Kantraprawira Rusadi, 2004. *Sistem Politik Indonesia, Model Suatu Pengantar*. Bandung, Edisi Revisi, Sinar Baru Elgisindo.
- KartiniKartono. 1989, *pendidikan politik sebagai bagian dari pendidikan orang dewasa*. Mandar maju.
- Karim, Rusli, M. 1989. *Peranan ABRI Dalam politik dan pengaruhnya dalam pendidikan politik di Indonesia*. Jakarta: CV Haji Masagung
- Kurniadi, Eddy. 1991, *Peranan Pemuda Dalam Pembangunan Politik Indonesia*. Bandung, Angkasa.
- Labolo, Muhadam. 2015. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia :Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Latief Iqbal, 2016. *Peran Parpol Dalam Pemilu Legislatif*. Sulselprov.co.id
- Muis, Ruslan. 2000, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*, Solo: Era Intermedia
- Naning, Ramdhan, 1982, *Pendidikan Politik Dan Regenenerasi*, Jakarta, Liberty.
- Nur, Khoiron 1999, *Pendidikan Politik Bagi Warga Negara, Tawaran Operasional dan kerangka Kerja*, Yogyakarta: LKIS
- Pamungkas, ISigit. 2012. *Partai Politik Teoridan Praktik Di Indonesia*. Yogyakarta : Institute For Democracy and Welfarism.
- Poerwadarminta W.J.S. 1976. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka
- PrajudiAdmosudirjo. 2001, *Teori Kewenangan*, Jakarta, PT. RinekaCipta
- Prihatmoko, Joko. 2003. *Pemilu 2004 dan konsolidasi demokrasi*, Semarang LP21 Press

- Riduwan. 2009. *Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung : CV Alfabeta.
- Rudini, Hidayat. 1989, *Sistem Politik Kehidupan Generasi Muda*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Soekanto Soerjono. 2017, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Sy, Pahmi. 2010. *Politik Pencitraan*, Jakarta, GaungPersada Pers.
- Suharsimi Arikunto. 1985. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT. BinaAksara.
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*. Jakarta PT. Rineka Cipta.
- Surbakti, Ramlan, 1999. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia
- Zainal, NiningHazlinda, 2008, *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok Dan Fungsi Dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar*. Skripsi

B. Dokumentasi

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002